

**PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN KEMLU RI DALAM RENCANA
KEIKUTSERTAAN INDONESIA DI *THE ORGANISATION FOR
ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT* (OECD) TAHUN 2023
TUGAS AKHIR**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

DIMAS KURNIAWAN

20323346

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN KEMLU RI
DALAM RENCANA KEIKUTSERTAAN INDONESIA DI
*THE ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND
DEVELOPMENT (OECD) TAHUN 2023***

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

DIMAS KURNIAWAN

20323346

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Proses Pembuatan Keputusan Kemlu RI dalam Rencana Keikutsertaan Indonesia di *the Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) Tahun 2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Laporan Praktik Lapangan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

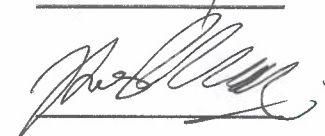
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

1. Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
2. Ayu Heryati Naqsbandiyah, S.IP., M.A.
3. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
4. Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.

Tanda Tangan



Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan praktik lapangan ini adalah hasil penulisan independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

19 Februari 2024,



Dimas Kurniawan

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Tujuan Kegiatan.....	5
1.4 Manfaat.....	6
1.4.1 Manfaat bagi Mahasiswa.....	6
1.4.2 Manfaat bagi Program Studi.....	7
1.4.3 Manfaat bagi Instansi/Lokasi Praktik Lapangan.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.6 Kerangka Pemikiran.....	13
1.7 Metode Pelaksanaan Kegiatan.....	14
1.7.1 Jenis Kegiatan.....	14
1.7.2 Subjek dan Objek Kegiatan.....	14
1.7.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan.....	14
1.7.4 Linimasa Pelaksanaan Kegiatan.....	15
1.7.5 Pengumpulan dan Analisis Data.....	15
1.8 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	18
PROFIL DAN TUGAS KEMENTERIAN LUAR NEGERI	
REPUBLIK INDONESIA	18
2.1 Profil Instansi/Lokasi Kegiatan.....	18
2.1.1 Tugas dan Fungsi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia....	20
2.1.2 Tugas dan Fungsi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri.....	21
2.1.3 Tugas dan Fungsi Pusat Strategi Kebijakan Multilateral.....	22
2.1.4 Struktur Organisasi Instansi BSKLN.....	23
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Magang.....	25
2.2.1 Pengenalan Lingkungan Kerja Kemlu RI.....	29
2.2.2 <i>Training</i>	30
2.2.3 <i>Event Coordinating</i>	31

2.2.4 <i>Timeline</i> Kegiatan.....	34
BAB III	37
HASIL DAN PEMBAHASAN	37
3.1 Analisis Permasalahan.....	37
3.2 Proses Perumusan Rekomendasi Kebijakan dalam Rencana Keikutsertaan Indonesia di OECD oleh BSKLN.....	39
3.2.1 Kepentingan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Komparasi Negara Berkembang Anggota OECD.....	46
3.2.2 Rumusan Kebijakan BSKLN.....	69
3.2.3 Potensi Keuntungan dan Risiko.....	75
3.3 Alur Pembuatan Keputusan Luar Negeri.....	81
BAB IV	83
PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Rekomendasi.....	84
4.2.1 Rekomendasi kepada BSKLN.....	84
4.2.2 Rekomendasi Kegiatan Praktik Kerja.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Tabel 1.1 Mengenal Isi Pokok dari Keseluruhan Literature Review	10
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BSKLN	25
Gambar 2.2 <i>Flyer</i> FKKLN dan Rapat FKKLN	33
Tabel 2.3 Timeline Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	34
Gambar 3.1 Grafik GDP Chili	47
Gambar 3.2 Grafik GDP Hungaria	50
Gambar 3.3 Grafik GDP Turki	52
Gambar 3.4 Grafik GDP Meksiko	55
Gambar 3.5 Perbandingan GDP Indonesia	57
Gambar 3.6 Grafik FDI Chili	59
Gambar 3.7 FDI Hungaria	59
Gambar 3.8 Grafik FDI Turki	60
Gambar 3.9 FDI Meksiko	61
Gambar 3.11 Grafik <i>Government Trust Chili</i>	64
Gambar 3.12 Neraca Perdagangan Hungaria	65
Gambar 3.13 <i>Trade in Goods and Services</i> Turki	66
Gambar 3.14 Grafik <i>Trade in Goods and Services</i> Meksiko	67
Gambar 3.15 Neraca Perdagangan Indonesia	68

GLOSARIUM

BSKLN	:	Badan Strategi Kebijakan Multilateral
CLI	:	<i>Composite Leading Indicators</i>
EE	:	<i>Enhanced Engagement</i>
FDI	:	<i>Foreign Direct Investment</i>
FKKLN	:	Forum Komunikasi Kebijakan Luar Negeri
GDP	:	<i>Gross Domestic Product</i>
IEA	:	<i>International Energy Agency</i>
JWP	:	<i>Joint Work Programme</i>
Kemlu RI	:	Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
MIKTA	:	Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia
NME	:	<i>Non-Member Economies</i>
OECD	:	<i>The Organisation for Economic Cooperation Development</i>
PSKM	:	Pusat Strategi Kebijakan Multilateral

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik kerja lapangan merupakan salah satu bagian penting dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan praktis profesional bagi individu. Praktik kerja sendiri dapat memberikan kesempatan terlebih pada mahasiswa maupun calon ekspertis dan profesional dalam memperoleh pengalaman kerja secara praktis dan ril di lapangan sesuai pada minat yang digeluti dengan menerapkan pengetahuan dan teori-teori yang telah dipelajari ke dalam lingkungan kerja nyata. Dengan adanya pengalaman terjun langsung ke lapangan akan memberikan gambaran yang sebenar-benarnya secara faktual dan komprehensif. Sebagai mahasiswa hubungan internasional yang tengah berproses dalam memiliki spesialisasi pada bidang ekonomi politik multinasional, adanya kesempatan untuk terjun secara langsung ke lapangan dan melihat bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan politik luar negeri sebenarnya berjalan serta mendapatkan kesempatan untuk dapat ikut serta berkontribusi seperti memberikan gagasan, ide, dan rekomendasi berbasis data faktual menjadi sebuah pengalaman yang sangat membantu penulis dalam mengimplementasikan ilmu dan teori yang penulis terima selama masa pembelajaran di dalam kelas.

Terlebih, ditempatkan pada Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) merupakan batu loncatan dalam mengejar jenjang karir yang penulis impikan. Hal tersebut dikarenakan BSKLN memiliki tugas dalam

menyusun kebijakan teknis, rencana serta program analisis dan rekomendasi strategi kebijakan pada bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, melaksanakan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan pada bidang penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri, memantau evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan pada bidang penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri, serta melaksanakan tata kelola organisasi dan administrasi BSKLN.

Selama melaksanakan praktik kerja di divisi PSKM, penulis ditempatkan pada Fungsi Ekonomi di mana fokus mengkaji, merumuskan, dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait perkembangan ekonomi Indonesia baik secara bilateral, multilateral dan bahkan forum dan organisasi internasional yang berfokus pada ekonomi dan pembangunan. Ditempatkan pada posisi tersebut secara bersamaan juga sangat membantu penulis dalam memperdalam fokus studi yang penulis tengah pelajari seta dalam menyelesaikan tugas akhir. Melalui kesempatan melakukan praktik kerja di Fungsi Ekonomi PSKM pula sangatlah membantu penulis dalam mengumpulkan sumber-sumber data langsung dari ekspertis yang penulis kira dapat digunakan dalam menyusun penelitian penelitian yang tengah dilakukan penulis.

Berdasarkan praktik kerja lapangan yang penulis laksanakan di Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), penulis akan mengangkat penelitian terkait *the Organisation for Economic Cooperation Development (OECD)* dan

beberapa negara berkembang anggotanya seperti Hungaria, Chili, Meksiko dan Turki serta negara tidak anggotanya atau *non-member economies* (NME) yang mana dalam kasus ini adalah Indonesia yang tengah mempertimbangkan keanggotaan dalam OECD.

Adapun OECD sendiri merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang kerja sama ekonomi dan pembangunan. Selain itu, tujuan didirikannya OECD adalah untuk mempererat kerja sama dan pembangunan ekonomi serta memperbaiki proses penyusunan kebijakan ekonomi negara anggota dan negara lain di dunia demi mewujudkan stabilitas perekonomian yang berkelanjutan. OECD kini memiliki 37 negara anggota. Sebagian besar negara anggota OECD adalah negara-negara maju, namun ada juga beberapa negara berkembang yang tergabung di dalamnya (OECD, n.d.). Indonesia sendiri sebagai NME OECD memiliki peran penting dalam organisasi internasional ini, adapun NME OECD sendiri yaitu negara anggota tidak resmi yang berperan sebagai mitra kunci dalam menjalin hubungan kerja sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Nilsson 2006).

Rencana keanggotaan Indonesia ke dalam OECD pun bukan suatu hal yang mudah dan spontan. Sebagai NME, Indonesia berhasil menjadi mitra kunci OECD sebab memiliki sumber daya dan telah memenuhi standar indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh OECD melalui *framework*-nya. Berdasarkan *Framework for the Consideration of Prospective Members*, OECD memiliki beberapa tolok ukur yang dipakai untuk menilai apakah suatu negara dapat diterima menjadi anggota OECD.

Salah satu tolok ukur tersebut adalah *State of Readiness* (kesiapan), yang ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap beberapa guidelines OECD di antaranya *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*, *Codes of Liberalisation of Capital Movements*, *Recommendation on Principles of Corporate Governance*, *Recommendation on Principles for Internet Policy Making*, *Inclusive Framework on BEPS Implementation* dan *Model Tax Convention on Income and on Capital* (OECD 2017).

Melalui praktik kerja di BSKLN Kemlu RI pula, penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian terkait pertimbangan keikutsertaan Indonesia dalam *the Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) berdasarkan dinamika kondisi negara-negara berkembang OECD yaitu Chili, Hungaria, Meksiko dan Turki. Indonesia yang saat ini masih menjadi *non-member economic* OECD dapat melihat kepentingan dan *benefit* yang dapat diperoleh dengan bergabung menjadi bagian dari organisasi internasional tersebut melalui rekomendasi kebijakan yang diajukan berdasarkan *policy brief* divisi PSKM BSKLN Kemlu RI yang mana akan dibahas secara rinci dan komprehensif dalam penelitian yang dilakukan penulis kali ini.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tugas BSKLN Kemlu RI dalam proses perumusan rekomendasi kebijakan terkait rencana keikutsertaan Indonesia dalam *the Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD)

berdasarkan dinamika kondisi negara berkembang anggota OECD (Chili, Hungaria, Meksiko, Turki) tahun 2023?

1.3 Tujuan

Adapun riset kali ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan kepentingan keikutsertaan Indonesia dalam *the Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) berdasarkan dinamika kondisi negara berkembang anggota OECD (Chili, Hungaria, Meksiko, Turki) tahun 2023.
2. Untuk melihat kebijakan yang dapat diambil Indonesia dalam pertimbangan keanggotaan OECD berdasarkan dinamika kondisi negara berkembang anggota OECD.
3. Untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang mahasiswa dapatkan di kelas selama studi dengan menerjemahkannya ke dalam praktik sehari-hari di lingkungan kerja Kemlu RI guna memperdalam pemahaman antara teori dan praktik.

1.3.2 Tujuan Kegiatan

1. Untuk memberikan pengalaman kerja kepada penulis sebagai mahasiswa hubungan internasional UII terkait dunia kerja di lingkup Kemlu RI pada divisi Pusat Strategi Kebijakan Multilateral dengan mengimplementasikan teori yang didapatkan di kelas.

2. Untuk mendapatkan data-data sumber primer dan sekunder yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian.
3. Untuk memperluas kesempatan jaringan profesional melalui praktik kerja lapangan kepada mahasiswa melalui interaksi dengan rekan kerja, supervisor, dan ekspertis di lingkungan kerja Kemlu RI.
4. Untuk memperoleh pengalaman kerja dan mengembangkan keterampilan praktis kepada mahasiswa secara langsung di lingkungan kerja Kemlu RI.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat bagi Mahasiswa

Adapun manfaat praktik kerja lapangan bagi mahasiswa yaitu untuk memperoleh pengalaman praktik kerja di BSKLN Kemlu RI di antaranya:

1. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa dalam dinamika BSKLN Kemlu RI dalam menyusun dan merumuskan kebijakan luar negeri Indonesia.
2. Untuk studi perbandingan antara teori dan praktik yang digunakan mahasiswa pada bangku perkuliahan dengan dunia kerja ril di lapangan.
3. Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai kegiatan di BSKLN Kemlu RI terkhusus mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil Kemlu RI sebagai pembuat *policy* dan dapat berinteraksi dengan team di BSKLN Kemlu RI.

4. Untuk mengukur kemampuan atau keterampilan yang dimiliki mahasiswa dan untuk mendapatkan keterampilan baru dalam dunia pemerintahan.

1.4.2 Manfaat bagi Program Studi

Adapun manfaat praktik kerja lapangan di BSKLN Kemlu RI bagi program studi yaitu:

1. Untuk memperoleh masukan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini, terkhusus di Kemlu RI terhadap tenaga Sarjana pada program studi Hubungan Internasional.
2. Untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan agar melahirkan lulusan yang sesuai dan diperlukan oleh dunia kerja
3. Untuk peningkatan kurikulum di mana program studi dapat memperbaharui dan meningkatkan kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan pada sistem pemerintahan
4. Untuk meningkatkan daya saing mahasiswa di pasar tenaga kerja setelah lulus sebab memiliki pengalaman kerja dan keterampilan yang relevan
5. Untuk peningkatan reputasi program studi melalui jalinan kemitraan yang kuat dengan kementerian-kementerian terkhusus pada Kemlu RI.

1.4.3 Manfaat bagi Instansi/Lokasi Praktik Lapangan

Adapun manfaat praktik kerja lapangan di BSKLN Kemlu RI bagi Instansi Kemlu RI di antaranya:

1. Instansi dapat menilai kualitas pendidikan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta khususnya program studi S1 Hubungan Internasional.
2. Instansi dapat menjalin koneksi yang lebih erat dengan perguruan tinggi terkait yang dapat membuka peluang untuk kerja sama seperti pada penelitian, pengembangan, proyek dan pelatihan, dan lain-lain.
3. Instansi dapat memiliki akses langsung ke potensi dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa.
4. Inovasi dan perspektif baru melalui mahasiswa yang sering membawa pemahaman berbeda terhadap teknologi, tren, dan atau konsep-konsep baru.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan riset yang valid dan kredibel, penulis memiliki empat tinjauan pustaka sebagai sumber literatur dan data utama yang digunakan penulis sebagai bahan rujukan dalam membantu menulis penelitian kali ini.

Tinjauan pustaka pertama yang berjudul *Composite Leading Indicators for Major OECD Non-Member Economies* Brazil, China, India, Indonesia, Russian Federation, South Africa akan digunakan untuk menganalisis negara-negara berkembang anggota OECD yang akan dilihat berdasarkan dinamika kondisi negaranya melalui indikator-indikator yang dirancang oleh OECD (CLI) yang selanjutnya akan diperbandingkan

dengan dinamika kondisi Indonesia dengan indikator yang sama terkait pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Nilsson (2006) menjelaskan bahwasannya OECD membuat telah membuat *composite leading indicators* (CLI) bagi negara anggotanya sejak 1980-an bahkan juga untuk Indonesia, China, Brazil, India, Rusia, dan Afrika Selatan yang merupakan *non-member economies* (NME) OECD. Saat ini, CLI digunakan untuk pertimbangan perluasan cakupan negara anggota dan NME OECD untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Pada tinjauan pustaka kedua dengan judul "*Cooperation with Non-Member Countries: The Global Perspective*", in *The History of the International Energy Agency* secara komprehensif juga akan dibahas terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai negara NME OECD dan negara-negara berkembang OECD terkait ekonominya melalui konsep dari *International Energy Agency* (IEA) yang merupakan *OECD framework*. Dalam konteks ini, IEA menganggap negara-negara berkembang berperan antara sebagai mitra untuk berdialog dengan objektif dari IEA terhadap NME untuk mempromosikan kerja sama dengan negara produsen minyak dan konsumen minyak yang mana komoditas-komoditas yang berada di dalamnya ini bersifat eksklusif (Scott 2004).

Pada tinjauan pustaka ketiga yang berjudul *Gross Earning Inequalities in OECD Countries and Major Non-Member Economies* akan digunakan untuk membahas pertumbuhan pembangunan negara-negara berkembang anggota OECD dan Indonesia sebagai NME. Pada konteks ini akan diambil konsep terkait *gross earning inequalities* pada negara anggota

OECD dan NME dalam menjelaskan *gap* pada negara-negara di bahasan penelitian kali ini (Braconier and Valenzuela 2014).

Pada tinjauan pustaka keempat yang berjudul *OECD Economic Surveys: Indonesia 2021*. Buku tersebut menjelaskan mengenai OECD yang melakukan *survey* terhadap masalah yang dihadapi Indonesia sebagai negara NME OECD melalui aspek-aspek CLI serta dengan memberikan rekomendasi kebijakan. Lebih lanjut, buku tersebut juga menjelaskan statistik *income* dan *productivity convergence* Indonesia sebagai NME mengalami perlambatan sejak 2014 berdasarkan persentase *gap* GDP per kapita Indonesia dengan 18 negara anggota OECD dengan GDP per kapita terendah (OECD 2021).

Konsep-konsep yang telah disebutkan di atas akan selanjutnya dikontekstualisasikan melalui pendekatan *decision making theory rational actor model* yang diajukan oleh Allison guna mengambil hasil akhir dan menilai pilihan-pilihan alternatif tersedia terkait pertimbangan keikutsertaan Indonesia ke dalam OECD Konsep dari rational actor model dari decision making theory Allison mengidentifikasi fenomena sebagai tindakan yang diambil oleh purposeful agent. Pada model ini sendiri akan digunakan empat variabel yaitu *goals* dan objektif; *alternatives*; *consequences*; *choice*. (Kafle 2011).

Tabel 1.1 Mengenal Isi Pokok dari Keseluruhan Literature Review

No.	Nama Penulis	Judul Literatur	Tempat Publikasi	Argumen Penulis
1.	Ronny Nilsson	<i>Composite Leading Indicators for Major OECD Non-Member Economies</i> Brazil, China,	OECD Publishing, Paris	- OECD membuat <i>composite leading indicators</i> (CLI) bagi

		India, Indonesia, Russian Federation, South Africa		<p>negara anggotanya sejak 1980-an</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indonesia, China, Brazil, India, Rusia, dan Afrika Selatan merupakan <i>non-member economies</i> (NME) OECD - Saat ini CLI digunakan untuk pertimbangan perluasan cakupan negara anggota dan NME OECD akan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
2.	Richard Scott	<i>“Cooperation with Non-Member Countries: The Global Perspective”, in The History of the International Energy Agency</i>	OECD Publishing, Paris	<ul style="list-style-type: none"> - Didirikannya International Energy Agency (IEA) melalui framework OECD - IEA menganggap negara-negara berkembang berperan antara sebagai mitra untuk berdialog - IEA memiliki objektif terhadap NME untuk mempromosikan kerja sama dengan negara produsen minyak dan konsumen minyak - Komoditas di IEA bersifat eksklusif
3.	Henrik Braconier, Jenifer Ruiz-Valenzuela	<i>Gross Earning Inequalities in OECD Countries and Major Non-Member Economies</i>	OECD Publishing, Paris	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan masih adanya inequality terhadap pendapatan antara negara-negara OECD sebab <i>skill-biased</i> dan <i>technological change</i> sebagai faktornya - Indonesia memiliki gap yang cukup jauh dari negara-negara berkemang OECD terkait <i>earning equality</i>
4.	OECD	OECD Economic Surveys:	OECD	<ul style="list-style-type: none"> - OECD melakukan <i>survey</i>

		<i>Indonesia 2021</i>	<i>Publishing, Paris</i>	<p>terhadap masalah yang dihadapi Indonesia sebagai negara NME OECD melalui aspek-aspek CLI dan memberikan rekomendasi kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - OECD menjelaskan statistik <i>income</i> dan <i>productivity convergence</i> Indonesia sebagai NME mengalami perlambatan sejak 2014 berdasarkan persentase gap GDP per kapita Indonesia dengan 18 negara anggota OECD dengan GDP per kapita terendah
--	--	-----------------------	--------------------------	---

Keempat bahan rujukan di atas merupakan hasil penelitian sebelumnya yang dirasa penulis relevan sebagai sumber utama dalam mengkaji dan menganalisis pembahasan pada topik penelitian kali ini. Melalui sumber-sumber utama tersebut yang menjadi data tersebut, penulis akan mencoba sebuah pembaruan dalam melihat fenomena yang terjadi antara hubungan Indonesia sebagai negara *non-member economies* OECD dan juga OECD itu sendiri. Penelitian ini dirasa penting untuk menjelaskan tingkat *engagement* Indonesia yang beragam pada *guidelines* OECD dan melihat langkah bijak yang dapat diambil Indonesia melalui rekomendasi kebijakan tersedia yang telah dikaji dan dicermati berdasarkan posisi Indonesia dalam mendapatkan *interest*-nya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Policy-Making dan Implementasi: Tugas BSKLN Kemlu RI

Menurut Berridge (2010) dalam “*Diplomacy Theory and Practice*” dijelaskan bahwa proses *policy making* dan pengimplementasian, Kementerian luar negeri memiliki tanggung jawab dalam *advising* kebijakan yang mana hendak diimplementasikan serta menyusun aturan dan instruksi dan memastikan aspek-aspek tersebut benar-benar dilaksanakan. Lebih jauh, dalam mendukung proses pembuatan kebijakan, Kemlu memiliki departemen badan pembuatan kebijakan. *Planning unit* tersebut sendiri berfungsi untuk mengantisipasi *future problems* dengan menghindari *conventional mindset* atau pola pemikiran yang cenderung bersifat jangka pendek.

Dalam mengkontekstualisasikan teori dalam penelitian ini, Badan Strategi Kebijakan Luar sebagai bagian dari Kementerian Luar Negeri Indonesia bertindak sebagai *planning-unit* perumus kebijakan luar negeri terhadap rencana keikutsertaan Indonesia dalam *the Organisation and Economic Cooperation Development* (OECD) berlandaskan komparasi dengan dinamika kondisi negara-negara berkembang anggota OECD (Chili, Hungaria, Meksiko, Turki).

Dari hal di tersebut dapat dikatakan, Kemlu bukan hanya mengemban tanggung jawab dalam merespons kebutuhan di masa sekarang, namun juga memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat mengakomodir kebutuhan di masa yang akan mendatang. Dengan adanya BSKLN sebagai *planning-unit* pula proses perumusan rekomendasi

kebijakan dapat dipersiapkan dengan baik dalam menghadapi tantangan global yang semakin dinamis dan kompleks.

1.7 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Adapun metode dari pelaksanaan praktik kerja lapangan di BSKLN Kemlu RI dilakukan secara *on-site* atau *work from office* dan *off-site* atau *work from anywhere*. Pelaksanaan kedua metode pun dilakukan langsung di Kemlu RI pada periode Februari-April 2023.

1.7.1 Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan kali ini adalah praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa hubungan internasional Universitas Islam Indonesia di BSKLN Kemlu RI pada periode Februari-April 2023.

1.7.2 Subjek dan Objek Kegiatan

Subjek pada kegiatan praktik kerja lapangan kali ini adalah Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Indonesia. Adapun objek pada kegiatan praktik kerja ini yaitu terkait analisis proses pembuatan keputusan Kemlu RI dalam keikutsertaan Indonesia di *the Organisation for Economic Cooperation Development* (OECD) yang didasarkan pada dinamika kondisi negara-negara berkembang anggota OECD (Hungaria, Meksiko, Turki, Chili).

1.7.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan praktik kerja lapangan berlokasi di Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Indonesia pada divisi Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, Jl.

Pejambon No.6. Jakarta Pusat, 10110, Indonesia. Adapun waktu pelaksanaan praktik kerja adalah 14 Februari 2023–14 April 2023.

1.7.4 *Linimasa Pelaksanaan Kegiatan*

Tabel 1.2 Timeline Kegiatan Praktik Kerja

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	14 Februari–16 Februari 2023	<i>Entry briefing</i> , pengenalan tugas dan kewajiban peserta magang
2.	17 Februari–3 Maret 2023	Menyusun <i>policy briefs</i> , pertemuan dengan KBRI Brussels
3.	4 Maret–14 April 2023	<i>Training</i> , persiapan Forum Komunikasi Kebijakan Luar Negeri (FKKLN), rapat FKKLN

1.7.5 *Pengumpulan dan Analisis Data*

Penelitian kali ini menggunakan metode pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber data primer tersebut didapatkan dengan melakukan studi observasi di BSKLN Kemlu RI. Adapun studi observasi memiliki tujuan riset yang diformulasi dan direncanakan secara sistematis, di mana fenomena yang diteliti dilakukan *quality control* dan mengeliminasi bias (Sekaran and Bougie 2010, 215).

Adapun sumber data sekunder di antaranya jurnal, website resmi, dan laporan-laporan relevan dan bersifat kredibel yang selanjutnya dianalisis untuk mengkontekstualkannya ke dalam penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I

Penulis akan menjelaskan secara sistematis tersusun mulai dari latar belakang yang akan menjelaskan mengenai alasan penulis melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di BSKLN Kemlu RI serta kaitannya dengan pengambilan bahasan penelitian kali ini dengan topik analisis alternatif kebijakan yang dapat diambil Indonesia dalam keikutsertaan ke OECD berdasarkan dinamika kondisi negara-negara berkembang OECD. Adapun selanjutnya akan diajukan rumusan masalah terkait topik penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan sub bab tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode pelaksanaan kegiatan, dan sistematika pembahasan topik analisis.

BAB II

Penulis akan menjelaskan secara runtut pada tiap-tiap sub bab mengenai gambaran instansi/lokasi kegiatan yang mana dalam hal ini merupakan BSKLN Kemlu RI di mana penulis ditempatkan pada divisi PSKM serta tugas pokok dan fungsi instansi terkait. Penulis juga akan melampirkan bagan struktur instansi pada bagian ini. Pada sub bab selanjutnya di bab ini, akan dijelaskan secara komprehensif terkait pelaksanaan kegiatan magang penulis yang membahas proses pemberian, pengerjaan, dan hasil akhir tugas yang diberikan oleh staf dan atau diplomat di BSKLN Kemlu RI selama penulis melaksanakan praktik kerja.

BAB III

Penulis akan menjelaskan secara komprehensif dan mendetail terkait analisis atas alternatif kebijakan yang dapat diambil Indonesia terkait keikutsertaan dalam OECD yang didapatkan berdasarkan pada komparasi dengan dinamika kondisi negara-negara berkembang anggota OECD (Hungaria, Chili, Meksiko, Turki) yang kemudian akan dikontekstualisasikan melalui teori *policy making* dan pengimplementasiannya, pertimbangan potensi keuntungan dan kerugian apabila Indonesia bergabung ke dalam OECD serta alur proses perumusan kebijakan oleh BSKLN. Adapun pada bab ini juga akan secara rinci menjelaskan terkait diambilnya empat negara berkembang anggota OECD pada penelitian ini.

BAB IV

Penulis akan mengambil inti sari pada penelitian kali ini untuk ditarik kesimpulan dari pembahasan serta memberikan rekomendasi dari hasil penelitian yang penulis dapat.

BAB II
PROFIL DAN TUGAS KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

2.1 Profil Instansi/Lokasi Kegiatan

Adapun laporan praktik kerja ini dibuat sebagai bagian dari program magang yang telah diselesaikan oleh penulis di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia selama dua bulan pada periode Februari-April 2023 di Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN). Program praktik kerja di Kemlu RI memiliki tujuan untuk memberikan penulis kesempatan dalam mendapatkan pengalaman tidak hanya teoritis namun juga praktis serta memperluas pengetahuan dalam bidang yang relevan dengan fokus studi yang penulis tengah geluti dengan tentunya langsung mendapatkan bimbingan oleh para ekspertis, diplomat dan staf di Kemlu RI.

Sebagai instansi pemerintah, Kemlu RI merupakan sebuah tempat yang penulis cita-citakan untuk dapat merasakan pengalaman kerja di dalamnya. Kementerian yang berfokus pada masalah dan isu-isu luar negeri dan merumuskan kebijakan luar negeri Indonesia merupakan tempat yang penulis rasa dapat mengembangkan kapabilitas sesuai bidang yang penulis geluti. Selain itu, bertempat di ibu kota, tepatnya Jakarta Pusat, berproses dalam memiliki pengalaman kerja di Kemlu RI juga sangat membuka jaringan penulis. Peserta magang yang berasal dari universitas di penjuru Indonesia berhasil menambah relasi penulis dan wawasan baru dari perspektif berbeda dari masing-masing peserta praktik kerja menjadikan

pengalaman magang ini menjadi semakin berkesan bagi penulis. Lebih lanjut, dapat berdialog dan berinteraksi langsung dengan diplomat-diplomat di Kemlu RI juga berhasil memberikan *insight* yang penting bagi berkemabangnya pola pikir penulis selama bekerja dalam periode yang tergolong singkat itu.

Adapun BSKLN sendiri merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. BSKLN memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan luar negeri Indonesia dari berbagai cakupan, seperti pada aspek politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Melalui peran strategisnya tersebut, BSKLN berfungsi dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia di tingkat global, membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara mitra, dan memastikan kebijakan luar negeri Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, perdamaian, dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Dengan peran dan fungsinya yang vital, BSKLN Kemlu RI menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia selaras dengan kepentingan nasional, memperkuat posisi Indonesia di tingkat global, dan mendorong kerjasama internasional yang saling menguntungkan. BSKLN berkomitmen untuk menjaga ketahanan dan keamanan nasional, mempromosikan perdamaian, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui diplomasi yang efektif dan strategis.

Adapun dalam proses pengambilan keputusan luar negeri, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 37 Tahun 1999 Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwasannya kewenangan penyelenggaraan hubungan dan

politik luar negeri pemerintah Indonesia berada di bawah tangan Presiden. Dalam konteks pengambilan keputusan keikutsertaan Indonesia dalam OECD pula, Presiden bertindak sebagai *decision maker* dengan bantuan Kementerian Luar Negeri dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan tugas dan fungsi Kemlu RI.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Praktik kerja lapangan yang telah dilaksanakan penulis bertempat di Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia Kementerian Luar Negeri RI. Adapun Kementerian Luar Negeri sendiri merupakan salah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan luar negeri negara. Mengacu pada Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 6 tahun 2021 terkait Organisasi dan Tata Kerja Kemlu, dijelaskan pada BAB I mengenai kedudukan, tugas dan fungsi. Adapun fungsi Kemlu RI dijelaskan pada pasal 5 yaitu:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri.
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri.

- d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemlu dan Perwakilan Republik Indonesia.
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemlu dan Perwakilan Republik Indonesia.
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kemlu dan Perwakilan Republik Indonesia.
- g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemlu.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2023).

2.1.2 Tugas dan Fungsi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri

Adapun Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri mengacu pada Pasal 6 huruf j Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 6 tahun 2021 terkait Organisasi dan Tata Kerja Kemlu RI memiliki tugas dalam menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi kebijakan dan strategi pada bidang penyelenggaraan hubungan serta politik luar negeri. BSKLN sendiri memiliki tugasnya tersendiri dalam melaksanakan fungsinya yang mana dimaksud pada Pasal 585:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana serta program analisis dan rekomendasi strategi kebijakan pada bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri

- b. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan pada bidang penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan pada bidang penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri.
- d. Pelaksanaan tata kelola organisasi dan administrasi BSKLN.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2019).

2.1.3 Tugas dan Fungsi Pusat Strategi Kebijakan Multilateral

Adapun tugas dari Pusat Strategi Kebijakan Multilateral (PSKM) dijelaskan dalam Pasal 587 huruf d, yaitu untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis, serta penetapan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan pada bidang penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri pada lingkup multilateral.

Dalam Pasal 615 pula dijelaskan terkait fungsi yang diselenggarakan oleh PSKM, di antaranya:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan rekomendasi strategi kebijakan pada bidang penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri dalam lingkup multilateral,

- b. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan pada bidang penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri dalam lingkup multilateral.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup multilateral.
- d. Pelaksanaan layanan manajemen Pusat (Kemlu RI 2019).

2.1.4 Struktur Organisasi Instansi BSKLN

Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) merupakan salah satu lembaga di bawah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan strategis dan strategi luar negeri Indonesia. Adapun secara spesifik terdapat struktur susunan organisasi yang terdiri dari beberapa unit kerja yang bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya yang terdiri atas:

1. Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri

Adapun posisi ini dikepalai oleh Yayan Ganda Hayat Mulyana yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri Indonesia. Mengikuti struktur, Kepala BSKLN Kemlu RI pun membawahi lima divisi utama yang ada di BSKLN.

2. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri

Adapun sekretaris BSKLN dipimpin oleh Nina Kurnia Widhi yang membawahi divisi Bagian Perencanaan, Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Tata Usaha, Organisasi, dan Publikasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris BSKLN.

3. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Pada saat ini posisi Kepala PSKK Aspasaf dikepalai oleh Muhammad Takdir. Adapun Kepala PSKK Aspasaf membawahi Sub bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional PSKK Aspasaf.

4. Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa

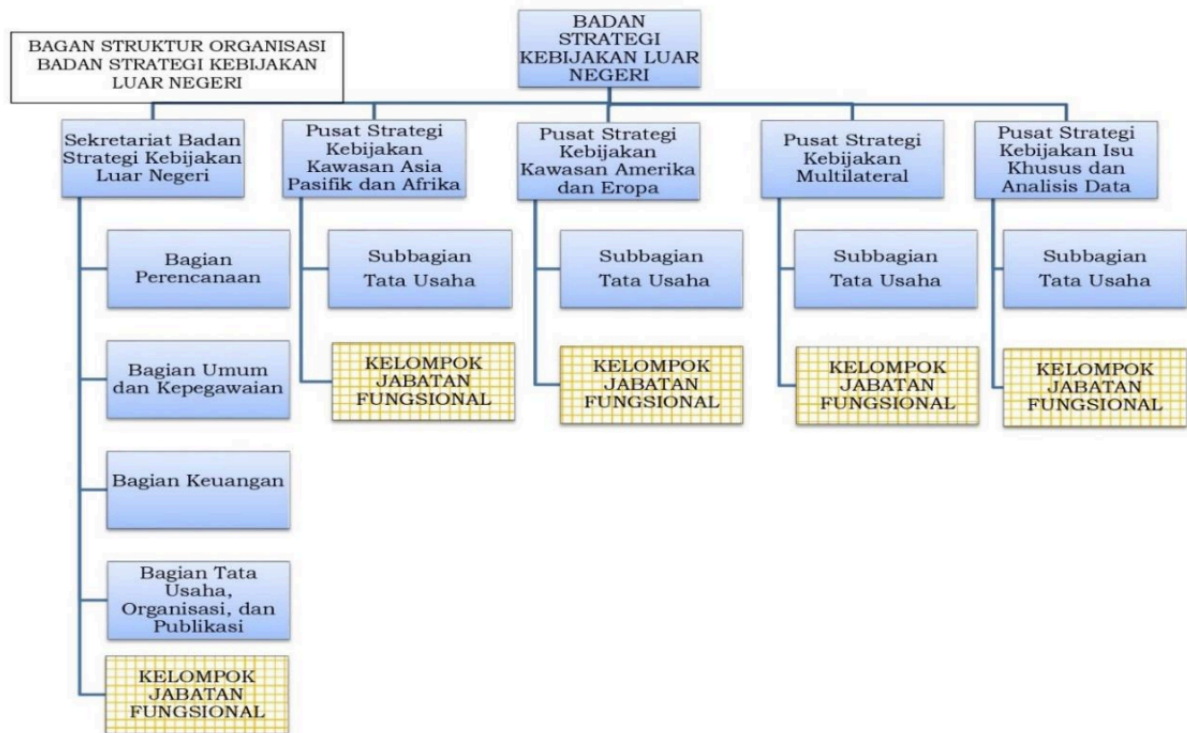
Adapun PSK Amerop pada saat ini dikepalai oleh Spica Alphanya Tutuhatunewa dan membawahi Sub bagian Tata Usaha dan juga Kelompok Jabatan Fungsional PSK Amerop.

5. Pusat Strategi Kebijakan Multilateral

Pada saat ini posisi Kepala PSKM dikepalai oleh Budi Rio Rahmanto. Adapun Kepala PSKM membawahi Sub bagian Tata Usaha serta tiga Kelompok Jabatan Fungsional PSKM di antaranya Fungsi Sosial Budaya, Fungsi Politik dan Keamanan, dan Fungsi Ekonomi di mana penulis melakukan praktik kerja lapangan.

6. Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data

Adapun PSK IKAD saat ini dikepalai oleh Edi Suharto dan membawahi Sub bagian Tata Usaha dan juga Kelompok Jabatan Fungsional PSK IKAD (Kemlu RI, n.d.).



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BSKLN

Melalui susunan organisasi BSKLN tersebut didesain untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dirumuskan dengan cermat, berdasarkan analisis mendalam, dan dilaksanakan secara efektif untuk meningkatkan posisi dan kepentingan nasional Indonesia di tingkat regional dan global.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan Magang

Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan di BSKLN Kemlu RI, penulis mendapatkan banyak bimbingan melalui arahan dari *supervisor*

yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan peserta magang. Peserta praktik kerja ditempatkan di bawah pengawasan *supervisor* secara langsung dan memberikan *feedback* secara berkala kepada peserta praktik kerja lapangan agar tetap *on-track* terhadap tugas dan kewajiban selama bekerja dan berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan yang ditujukan. Penulis diberikan tugas, proyek dan serta mengkoordinasikan *event* bersama staf yang tentunya tetap relevan dengan minat penulis dan tujuan dari pelaksanaan praktik kerja lapangan ini. Penulis juga mendapatkan kesempatan dalam berinteraksi dan berkolaborasi dengan tim dari berbagai departemen dan bahkan instansi lain serta memiliki kesempatan untuk belajar dari mereka melalui diskusi bersama dan kolaboratif *event*.

Tidak berorientasi pada itu saja, penulis juga merasa berkembang dari adanya tugas di luar dari tugas dan pekerjaan utama. Peserta magang terkhusus di divisi PSKM memiliki pekerjaan untuk mengelola konten informasi sosial media PSKM dengan mengisi info-info kegiatan yang tengah dilaksanakan PSKM. Penulis selaku peserta magang merasa memiliki tambahan kemampuan dengan diberikannya tugas tersebut seperti pada bidang *copywriting* dan *editing* yang mana dianggap esensial sebagai *skill* tambahan yang perlu dimiliki dalam mengejar jenjang karir yang penulis harapkan.

Adapun selama bekerja dan melaksanakan tugas, penulis selaku peserta magang mengemban tugas dan kewajiban seperti memahami aturan dan senantiasa mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku di Kemlu RI seperti kebijakan keamanan, privasi, dan etika kerja. Kemudian juga

menyelesaikan tugas dan proyek yang diberikan secara cermat dan tepat waktu serta mengikuti proses evaluasi dan serta umpan balik di mana peserta magang harus senantiasa siap menerima *feedback* yang bersifat konstruktif baik dari *supervisor* dan juga diplomat dan staf. Dengan melakukan tugas dan kewajiban tersebut dengan baik sangatlah membantu penulis sebagai peserta magang dalam mendapatkan manfaat penuh dan maksimal dari pengalaman praktik kerja lapangan, membangun reputasi yang baik, serta juga mempersiapkan diri untuk jenjang karir yang akan datang di masa depan.

Selama melakukan kegiatan praktik kerja di BSKLN Kemlu RI selama dua bulan pada divisi Pusat Strategi Kebijakan Multilateral (PSKM) dan bekerja pada Fungsi Ekonomi PSKM dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Fungsi Ekonomi. Sebagai peserta magang penulis bersama tim magang bertanggung jawab membantu staf dan diplomat dalam membuat *policy brief*, mempersiapkan dan membantu *event* PSKM kolaborasi dengan instansi eksternal, membuat notulensi pada rapat internal Fungsi Ekonomi dan rapat kerja sama dengan pihak luar, menyusun rekomendasi kebijakan terhadap isu-isu yang perlu dikoordinasikan serta membuat konten pada akun media sosial instagram BSKLN pada setiap *event* dan hari-hari besar.

Selama berada di Fungsi Ekonomi PSKM sendiri, penulis bekerja bersama tim yang terdiri dari Kepala Fungsi, diplomat, staf, dan tiga mahasiswa magang. Bersama Fungsi Ekonomi penulis mendapatkan banyak ilmu dan pandangan-pandangan baru dalam menyikapi suatu isu

serta menyelesaikan masalah. Adapun terdapat dua capaian besar dari pelaksanaan praktik kerja yang saya dapatkan selama bekerja di Fungsi Ekonomi. Pertama, penyusunan *policy brief* yang dilakukan penulis dalam menyusun dan merumuskan kebijakan serta *benefit and cost* Indonesia terhadap keikutsertaan di OECD. Peserta magang melakukan riset terhadap topik terkait dan mencari data terkait dari untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan diberikan kepada Kepala Fungsi Ekonomi sebagai usulan nantinya akan diajukan atau disampaikan ke dalam forum.

Kedua, terlaksananya kerja sama antara Pusat Strategi Kebijakan Multilateral (PSKM) Kemlu RI dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Manajemen IPMI dalam Forum Komunikasi Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) serta *launching* Reviu Kebijakan Kemitraan yang dilaksanakan di kampus IPMI. Peserta magang berkontribusi dalam proses *brainstorming* dalam perumusan rancangan acara terkait serta membuat notulensi pre-acara, notulensi acara, dan nota dinas.

Dengan mengikuti program praktik kerja lapangan di BSKLN Kemlu RI ini, penulis memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat meningkatkan kemampuan penulis di bidang yang ditekuni. Melalui kesempatan ini juga terbangun jaringan relasi profesional yang luas dan berhasil memperoleh wawasan berharga pada bidang perumusan dalam menentukan strategi-strategi kebijakan luar negeri Indonesia. Laporan praktik kerja kali ini sendiri mencakup pengalaman dan pembelajaran penulis selama proses kerja di BSKLN Kemlu RI pada divisi PSKM, serta

refleksi tentang dampak ataupun *output* yang diperoleh terhadap perkembangan baik *hard-skill* maupun *soft-skill* penulis sebagai calon profesional di bidang ini.

Selain itu, magang di BSKLN juga memberikan kesempatan untuk penulis memperluas jaringan dan membangun hubungan profesional. Penulis bertemu dengan berbagai diplomat, pejabat pemerintah, dan profesional dari berbagai negara yang bekerja sama dengan BSKLN. Penulis juga mendapatkan kesempatan belajar tentang budaya dan kebiasaan negara lain, serta mengembangkan keterampilan dalam berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis selama melakukan praktik kerja lapangan di BSKLN Kemlu RI dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

2.2.1 Pengenalan Lingkungan Kerja Kemlu RI

Pada tahapan pengenalan atau *entry briefing* yang dilakukan selama tiga kali pertemuan, seluruh peserta magang di BSKLN Kemlu RI mendapatkan pengenalan terhadap lingkungan kerja yang ada di Kemlu RI. Peserta magang juga dijelaskan terkait susunan organisasi Kemlu RI serta terkait tugas, fungsi, dan wewenang yang dipegang oleh para pemegang jabatan mulai dari menteri luar negeri sampai dengan tiap-tiap kepala pusat strategi.

Dalam kesempatan ini pula, peserta magang mendapatkan pemahaman terkait tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan.

Selain itu juga dijelaskan terkait etiket yang harus dilakukan selama di lingkungan kerja yang mana dijelaskan sikap dan bagaimana seseorang bertindak merupakan hal yang penting dan utama dalam bekerja.

2.2.2 *Training*

Salah satu kegiatan di BSKLN yang begitu penting dalam menambah kemampuan *soft skill* penulis adalah kesempatan untuk bekerja dengan tim yang berpengalaman dan berpengetahuan luas di bidang kebijakan luar negeri. Penulis yang ditempatkan di Fungsi Ekonomi PSKM dapat melibatkan diri dalam analisis mendalam terhadap isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Penulis diajak untuk melakukan riset, mengumpulkan data, dan menyusun laporan serta analisis yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

Selama melakukan praktik kerja lapangan di BSKLN Kemlu RI di PSKM, penulis banyak mendapatkan *training* ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh staf dan juga diplomat. Adapun tugas yang diberikan bervariasi, mulai dari membuat notulensi dari setiap rapat yang dilakukan oleh Fungsi Ekonomi PSKM, membuat rangkuman dari sumber-sumber isu atau topik tertentu, pengumpulan data-data relevan serta pembuatan rekomendasi kebijakan.

Salah satu contoh tugas yang diberikan oleh diplomat yang penulis rasa sangat membantu penulis dalam mengkaji dan

merumuskan suatu isu atau permasalahan yaitu pembuatan *policy brief* terkait analisis pembuatan pertimbangan Indonesia dalam OECD, di mana penulis dan tim mengumpulkan banyak data-data statistik untuk menentukan alternatif kebijakan yang dapat diambil Indonesia dalam menyikapi keikutsertaan di OECD. Dalam penyusunan tugas *policy brief* ini penulis pun langsung bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Strategi Multilateral di mana *policy brief* yang telah diselesaikan akan dibawa ke dalam forum OECD sebagai *standing point* atau posisi Indonesia.

Adapun beberapa *policy brief* yang telah dikerjakan oleh penulis di antaranya:

- 1) *Policy Brief: Capaian Sustainable Development Goals 2023*
- 2) *Policy Brief: Perkembangan Isu Financial Security Indonesia dan Global*
- 3) *Policy Brief: Situasi Ekonomi Dunia dan Prospek 2023*
- 4) *Policy Brief: Pertimbangan Keanggotaan Indonesia dalam The Organisation for Economic Cooperation Development (OECD)*

2.2.3 Event Coordinating

Event coordinating sendiri merupakan suatu hal yang baru bagi penulis, terlebih untuk dapat langsung belajar dari proses awal dalam mengkoordinasi suatu acara di Kemlu RI. Pada kesempatan ini, PSKM BSKLN Kemlu RI melakukan kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Sekolah Tinggi Manajemen IPMI terkait dalam Forum Komunikasi Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) serta *launching* Reviu Kebijakan Kemitraan yang dilaksanakan di kampus IPMI yang dilaksanakan pada tanggal 20–21 Maret 2023 dan berlokasi di Pancoran, Jakarta Selatan.

Adapun sebagai peserta magang yang turut andil dalam menyukseskan kegiatan tersebut, penulis senantiasa ikut serta mulai dari rapat koordinasi Fungsi Ekonomi PSKM dan melakukan notulensi hasil rapat koordinasi Fungsi Ekonomi PSKM terkait kerja sama dengan institusi IPMI, rapat persiapan FKKLN & *launching* reviu kebijakan kemitraan dengan IPMI, sampai dengan pelaksanaan rapat FKKLN dan *launching* reviu kebijakan dengan IPMI di mana penulis membantu staf menyiapkan acara, menjadi *runner* dalam acara, serta melakukan notulensi dari hasil rapat.

FORUM KOMUNIKASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI
dan Launching Review Kebijakan Kemitraan

Perkembangan Hijau Berkelanjutan:
Strategi Pemberdayaan Komoditas Pertanian
Indonesia di Pasar Global

MARET
21
2023

IPMI INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL, JAKARTA SELATAN
09.00 - 12.00 WIB

Remarks

Yayan Ganda Hayat Mulyana KEPALA BSKLN KEMLU	Rio Budi Rahmanto KEPALA PUSAT SK MULTILATERAL KEMLU	Agus Loekman LPPM IPMI INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

Narasumber

Dety Nuradillah HEAD OF RESEARCH LPPM IPMI	Antonius Yudi Triantoro DIREKTUR PPKRI KEMLU	Sam Aryadi KOORDINATOR FUNGSI EKONOMI PUSAT SK MULTILATERAL KEMLU

Penanggung

Violace Amalia Putri SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN PORTFOLIO DEVELOPMENT MANAGER, DSM	Rizal Algamar DIREKTUR TPA SOUTH EAST ASIA

LINK ZOOM: <https://tinyurl.com/mryf5x9e>



Gambar 2.2 Flyer FKKN dan Rapat FKKN

Tidak banyak hambatan yang ditemukan penulis, selama mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Berada di dalam tim yang kompeten dan memahami apa yang mereka kerjakan sangat membantu penulis dalam menjawab pertanyaan penulis saat mengalami kebingungan dalam menyelesaikan tugas. Terlebih, bersama dua orang mahasiswa magang yang berada pada tim yang sama dengan penulis juga sangat saling membantu dan koordinatif terhadap satu sama lain.

Selama kegiatan praktik kerja lapangan, penulis juga memiliki kesempatan untuk menghadiri berbagai pertemuan internal dan eksternal. Penulis ikut dalam diskusi dan konsultasi dengan perwakilan dari berbagai departemen dan lembaga pemerintah terkait kebijakan luar negeri. Hal ini memberikan wawasan yang luas tentang proses pengambilan keputusan dan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam merumuskan kebijakan yang efektif.

Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan praktik kerja lapangan di BSKLN Kemlu RI, penulis dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan pengalaman yang luar biasa dan berharga. Penulis mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang proses dan dinamika dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Penulis juga dapat mengembangkan keterampilan analisis, penelitian, dan komunikasi yang sangat

berharga untuk persiapan karir saya di bidang kebijakan luar negeri. Praktik kerja lapangan ini berperan sebagai pondasi yang kokoh bagi perkembangan profesional penulis dan menegaskan minat saya dalam berkontribusi dalam upaya memajukan kepentingan nasional Indonesia di kancah internasional.

2.2.4 Timeline Kegiatan

Tabel 2.3 Timeline Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan		
Tanggal	Jenis Kegiatan	Capaian
14-02-2023	<i>Entry Briefing</i>	Mengetahui pengetahuan dasar dan lingkungan magang kementerian luar negeri
15-02-2023	<i>Entry Briefing</i> PSKM	Pengenalan struktur dan tugas umum pada Pusat Strategi Kebijakan Multilateral
16-02-2023	Pembagian <i>job description</i> mandiri Peserta Magang	Melakukan pembagian tugas mandiri peserta magang dalam pengelolaan sosial media PSKM
17-02-2023	<i>Financial Security Policy Brief Drafting</i>	Menyusun <i>policy brief</i> terkait ketahanan finansial Indonesia dan global
20-02-2023	<i>Financial Security Policy Brief Drafting</i>	Menyusun <i>policy brief</i> terkait ketahanan finansial Indonesia dan global
21-02-2023	Pertemuan dengan KBRI Brussels	Notulen poin penting dari hasil rapat terkait <i>ASEAN EU on Palm Oil</i>
22-02-2023	Revisi <i>Financial Security Policy Brief Drafting</i>	Menyusun revisi data <i>policy brief</i> terkait ketahanan finansial Indonesia dan global
23-02-2023	Pertemuan Dirjen SK Multilateral dan UGM	Menyusun memorandum Laporan Sosialisasi Peluang Kerja pada Organisasi Internasional
24-02-2023	<i>Focus Group Discussion Our Common Agenda</i>	Notulen rapat FGD terkait OCA bersama PELH

27-02-2023	Rapat koordinasi Fungsi Ekonomi PSKM	Notulen hasil rapat koordinasi Fungsi Ekonomi PSKM terkait kerja sama dengan institusi IPMI
28-02-2023	<i>Training</i>	Menyusun ringkasan mengenai implementasi SDGs di Indonesia (sampai 2030) dan visi setelah 2030 (<i>discussion about post SDGs 2030</i>) di Indonesia dan negara-negara relevan
01-03-2023	<i>Training</i>	Menyusun ringkasan mengenai implementasi SDGs di Indonesia (sampai 2030) dan visi setelah 2030 (<i>discussion about post SDGs 2030</i>) di Indonesia dan negara-negara relevan
02-03-2023	<i>Focus Group Discussion</i> terkait <i>Advisory Opinion Climate Change</i>	Notulen hasil FGD bersama pakar hukum UI dan Ditjen HPI mengenai isu terkait
03-03-2023	Revisi Notulen	Notulen hasil FGD bersama pakar hukum UI dan Ditjen HPI mengenai isu terkait
06-03-2023	Rapat Persiapan FKKLN & Launching Reviu Kebijakan Kemitraan dengan IPMI	Notulen hasil rapat dan berkoordinasi terkait tugas dalam mempersiapkan acara
07-03-2023	<i>Training</i>	Menyusun statistik perdagangan negara- negara IPEF
08-03-2023	Pembuatan konten media rapat FKKLN & Launching Reviu Kebijakan Kemitraan dengan IPMI	Membuat <i>flyer</i> dan <i>broadcast</i> acara
09-03-2023	<i>Training</i>	Menyusun statistik perdagangan negara- negara IPEF
10-03-2023	<i>Training</i>	Menyusun statistik perdagangan negara- negara IPEF
21-03-2023	Rapat FKKLN & Launching Reviu Kebijakan Kemitraan dengan IPMI	Membantu staf menyiapkan acara dan menjadi <i>runner</i> di <i>venue</i>
5-04-2023	Finalisasi <i>Policy Brief the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)</i>	Menyusun <i>policy brief</i> terkait kepentingan keterlibatan Indonesia sebagai anggota OECD

13-04-2023	Koordinasi Rapat IPEF	Notulensi pada rapat IPEF terkait posisi Indonesia pada perundingan putaran ketiga <i>Senior Official Meeting (SOM) and Technical Level Negotiating Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)</i>
------------	-----------------------	--

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Permasalahan

Pada proses pembuatan kebijakan, perlu untuk memiliki landasan dasar di dalamnya. Adapun dalam konteks proses pembuatan kebijakan terhadap keikutsertaan Indonesia ke dalam *the Organisation for Cooperation and Development* (OECD), Indonesia dapat melihat dinamika kondisi negara-negara, secara spesifik negara berkembang yang lebih dahulu bergabung dengan organisasi internasional itu.

Indonesia sebagai *developing country*, melihat potensi akan pertumbuhan pada aspek ekonomi dan pembangunan dengan menggunakan *framework* yang telah ditetapkan OECD. Dengan berkaca pada negara-negara berkembang yang telah bergabung ke dalam organisasi internasional tersebut (Chili, Hungaria, Turki, dan Meksiko), didorong pula dengan kesiapan Indonesia yang telah memenuhi standar sebagai *prospective member* OECD, Indonesia melalui BSKLN Kemlu RI tengah mempertimbangkan keanggotaan dalam OECD sebab banyaknya *benefit* yang dapat diperoleh oleh Indonesia seperti:

1. Akses akan sumber daya dan pengetahuan: Indonesia bisa mendapatkan bantuan berupa *sources*, data, dan pengetahuan ekonomi dari rekam jejak negara-negara anggota OECD yang dapat digunakan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan *sustain*.

2. Struktural reformasi: Indonesia dapat menerapkan reformasi yang diperlukan dalam meningkatkan tingkat daya saing dan *growth* melalui rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang diberikan OECD kepada negara anggotanya.
3. Kerja sama internasional: Indonesia dapat berperan lebih aktif akan partisipasinya dalam berbagai forum dan dialog kerja sama terkhusus dengan negara-negara maju anggota OECD.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi: Indonesia dapat menerapkan standar dan praktik ekonomi sesuai dengan negara-negara maju OECD sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih maju.

Berdasarkan hal-hal di atas, dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil terkait keikutsertaan Indonesia di OECD oleh BSKLN sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peneliti melalui observasi di BSKLN dan kemudian akan membandingkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia dan dikomparasikan dengan negara-negara berkembang anggota OECD seperti Chili, Hungaria, Turki, dan Meksiko. Sementara, dipilihnya negara-negara tersebut sebab memiliki karakteristik pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan politik yang relatif sama dengan Indonesia, sehingga nantinya perbandingan akan menjadi lebih realistis (Braconier *and* Valenzuela 2014).

Dengan melihat signifikansi khususnya dari diplomasi ekonomi, Indonesia dapat menggunakan kesamaan karakteristik permasalahan yang dialami bersama keempat negara tersebut dengan tujuan mempromosikan *international trade* dan *foreign direct investment*, mengutilisasi fungsi

pasar, meminimalisir *cost and risk* dari adanya transaksi antar wilayah (Elisabeth et al. 2011, 112).

3.2 Proses Perumusan Rekomendasi Kebijakan dalam Rencana Keikutsertaan Indonesia di OECD oleh BSKLN

Adapun dalam konteks proses pembuatan rekomendasi kebijakan, perlu mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang kemudian dirumuskan berdasarkan tujuan dan objektif BSKLN. Hal tersebut merupakan hasil dari analisis dan evaluasi yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lebih lanjut, proses *policy making* melibatkan analisis mendalam terhadap setiap opsi yang tersedia. Dalam merumuskan kebijakan luar negeri perlu dinilai berdasarkan konsekuensi dan implikasi yang mungkin terjadi. Hal ini meliputi penilaian terhadap dampak sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan dari masing-masing prospek kebijakan yang dipertimbangkan untuk diimplementasikan. Dalam pengambilan keputusan yang kompleks, seringkali terdapat beberapa set keputusan tersirat yang mungkin dihasilkan dari *policy making*. *Policy making* juga dapat digunakan untuk menggambarkan serangkaian keputusan dan konsekuensinya.

Dalam merumuskan rekomendasi kebijakan ini, BSKLN sendiri mempertimbangkan kepentingan terkhusus dalam meningkatkan ekonomi dan perdagangan negara. Selain kepentingan terkait, BSKLN juga mempertimbangkan potensi *cost and benefit* apabila Indonesia bergabung

ke dalam OECD. Adapun hasil perumusan kebijakan sebagai bahan *advising* dari proses di atas di antaranya:

1. Meninjau Manfaat dan Tantangan Adopsi *Guidelines* OECD

Indonesia memiliki tingkat *engagement* yang beragam terhadap *guidelines* yang dikeluarkan oleh OECD. *Guidelines* ini bertujuan untuk mengarahkan kebijakan dan praktik ekonomi negara-negara anggota agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Meskipun Indonesia tidak mengadopsi seluruh *guidelines* yang dikeluarkan oleh OECD, negara ini telah mengambil langkah-langkah untuk mengadopsi beberapa *guidelines* yang dianggap relevan.

Salah satu contoh adopsi *guidelines* adalah *Model Tax Convention* yang disusun oleh OECD. Indonesia telah mengadopsi sebagian besar prinsip-prinsip dari *Model Tax Convention* ini, yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak dan penghindaran kebijakan fiskal yang merugikan negara. Dengan mengadopsi *Model Tax Convention*, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam hal pertukaran informasi perpajakan dan memperkuat tata kelola perpajakan di dalam negeri.

Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam forum G20, yang merupakan forum ekonomi internasional yang terdiri dari negara-negara maju dan berkembang. Melalui forum ini, Indonesia telah berpartisipasi dalam pembahasan mengenai OECD *Corporate Governance Principles*. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk

memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi, dan melindungi kepentingan pemegang saham. Dengan berpartisipasi dalam forum G20, Indonesia memiliki kesempatan untuk mempelajari dan mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam konteks perusahaan di negara ini.

Namun demikian, terdapat juga *guidelines* yang perlu dicermati terlebih dahulu sebelum diadopsi oleh Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan konteks sosial, ekonomi, dan hukum antara Indonesia dengan negara-negara anggota OECD. *Guidelines* tersebut perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia untuk memastikan bahwa penerapannya memberikan manfaat yang optimal.

Dalam rangka mengadopsi *guidelines* OECD, Indonesia perlu melakukan tinjauan lebih mendalam terkait manfaat dan tantangan yang mungkin timbul. Manfaatnya termasuk meningkatkan standar tata kelola perusahaan, mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan kerjasama internasional dalam berbagai bidang ekonomi. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup kesulitan dalam mengubah kebijakan dan praktik yang sudah ada, kebutuhan akan kapasitas kelembagaan yang memadai, dan penyesuaian dengan konteks lokal yang unik.

Dalam mengadopsi *guidelines* OECD, Indonesia perlu mempertimbangkan dengan seksama manfaat yang dapat diperoleh dan tantangan yang perlu dihadapi. Hal ini memerlukan keterlibatan

berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk memastikan implementasi yang efektif dan menghasilkan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat terus memperkuat keterlibatannya dalam mengadopsi *guidelines* OECD dan memainkan peran yang lebih aktif dalam pembentukan kebijakan ekonomi global.

2. Indonesia Memanfaatkan Program-Program OECD

Adapun Indonesia dapat memanfaatkan program-program dari OECD untuk berdialog dan meningkatkan kapasitas. Apabila Indonesia menjadi negara anggota OECD, Indonesia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan program *Enhanced Engagement* (EE) dan *OECD-Indonesia Joint Work Programme* (JWP) guna memperluas dialog dan meningkatkan kapasitas dalam kaitannya dengan *guidelines* OECD. Melalui EE, Indonesia dapat meningkatkan partisipasinya dalam komite-komite OECD, serta mengintegrasikan diri dalam sistem pelaporan statistik yang digunakan oleh organisasi ini. Selain itu, EE juga memberikan dorongan untuk mematuhi instrumen-instrumen OECD yang relevan.

Sementara itu, JWP antara OECD dan Indonesia menawarkan berbagai kegiatan dialog, kerja sama teknis, penelitian, *workshop*, dan dukungan pengembangan kebijakan. Melalui JWP, Indonesia dapat memilih dan fokus pada instrumen-instrumen atau

aktivitas yang sesuai dengan kepentingan nasional. Negara ini dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memenuhi persyaratan instrumen-instrumen tersebut atau berpartisipasi secara aktif untuk menyuarakan pandangan nasional dan pandangan negara-negara sejenis terhadap instrumen-instrumen tersebut.

Dengan memanfaatkan kedua mekanisme ini, Indonesia dapat mengambil manfaat yang signifikan. Pertama, negara ini dapat memperoleh akses ke pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh OECD, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan dan praktik ekonomi di dalam negeri. Kedua, Indonesia dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan internasional yang mempengaruhi bidang ekonomi, sehingga suara dan perspektif nasional dapat didengar dan dipertimbangkan secara lebih baik. Namun, penting untuk diingat bahwa pemanfaatan EE dan JWP juga menghadapi tantangan. Indonesia perlu memastikan bahwa sumber daya yang memadai dialokasikan untuk memanfaatkan kesempatan ini secara efektif. Diperlukan komitmen dan koordinasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri untuk mengintegrasikan hasil dari dialog dan kerja sama ini ke dalam kebijakan dan praktik yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, melalui program *Enhanced Engagement* (EE) dan *OECD-Indonesia Joint Work Programme*, Indonesia dapat memperluas dialog dan meningkatkan kapasitasnya dalam mengadopsi guidelines OECD. Dengan memanfaatkan peluang ini,

Indonesia dapat memperkuat partisipasinya dalam forum internasional, memperkaya pengetahuan dan keahlian nasional, serta memainkan peran yang lebih aktif dalam membentuk kebijakan ekonomi global yang berkelanjutan dan inklusif.

3. Kesempatan Indonesia dalam Dialog Bilateral

Indonesia memiliki kesempatan untuk melakukan dialog bilateral dengan negara-negara berkembang lain yang telah menjadi anggota OECD guna mempelajari tantangan, peluang, dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota OECD. Melalui pertukaran informasi dan pengalaman dengan negara-negara tersebut, Indonesia dapat memperoleh wawasan berharga tentang persiapan dan proses yang diperlukan untuk mengadopsi guidelines OECD.

Pendekatan khusus juga dapat dilakukan melalui kelompok Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia (MIKTA), yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Indonesia dapat memanfaatkan forum ini untuk berdiskusi dengan Meksiko dan Turki, yang juga merupakan anggota MIKTA, mengenai pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan OECD dan persiapan yang telah dilakukan untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota.

Meksiko dan Turki memiliki pengalaman yang relevan dalam menghadapi tantangan dan memenuhi persyaratan OECD. Meksiko telah menjadi anggota OECD sejak 1994, sementara Turki

bergabung pada tahun 1961. Dalam dialog bilateral dengan kedua negara ini, Indonesia dapat mempelajari langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk memperkuat kerjasama dengan OECD, mengadopsi guidelines, dan meningkatkan tata kelola ekonomi.

Pertukaran pengalaman melalui dialog bilateral dengan negara-negara MIKTA juga dapat membantu Indonesia mengidentifikasi kesamaan perspektif dan kepentingan dengan negara-negara tersebut. Dalam menghadapi persyaratan dan tantangan yang ada, Indonesia dapat bekerja sama dengan Meksiko dan Turki untuk menyuarakan pandangan bersama dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk mengambil manfaat dari kekuatan kolektif negara-negara MIKTA dalam berinteraksi dengan OECD. Negara-negara anggota MIKTA memiliki potensi untuk saling mendukung dalam persiapan dan penguatan kerjasama dengan OECD, serta berbagi pelajaran berharga dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul.

Dalam rangka meningkatkan dialog bilateral dengan negara-negara MIKTA yang telah menjadi anggota OECD, Indonesia perlu membangun kerangka kerja yang kuat untuk berbagi informasi, pengalaman, dan keahlian. Hal ini dapat melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan keterlibatan dan pemahaman yang komprehensif.

Dengan melakukan dialog bilateral dengan negara-negara berkembang yang telah menjadi anggota OECD, terutama melalui MIKTA, Indonesia dapat memperoleh wawasan berharga dan membangun kerjasama yang erat dalam upaya memenuhi persyaratan dan mengadopsi guidelines OECD. Dalam konteks ini, Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman dan pandangan negara-negara MIKTA untuk menghadapi tantangan dan memperkuat posisinya dalam menjalankan peran yang lebih aktif dalam kebijakan ekonomi global (Scott 2004).

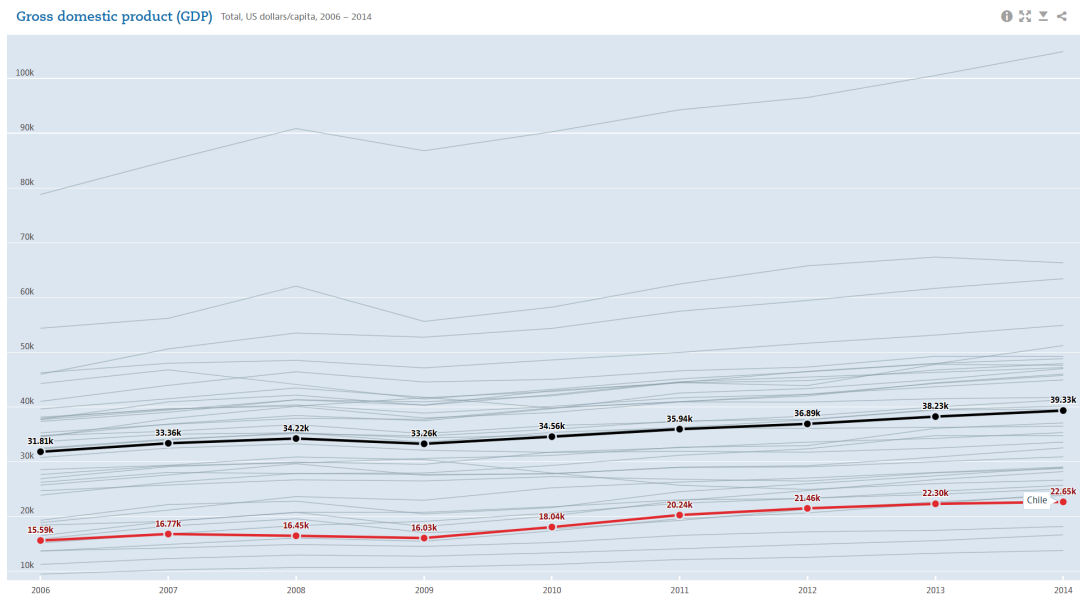
3.2.1 Kepentingan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Komparasi Negara Berkembang Anggota OECD

Dalam merumuskan rekomendasi kebijakan terhadap keikutsertaan Indonesia dalam *the Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), diperlukan analisis terkait dinamika kondisi negara-negara berkembang OECD (Chili, Hungaria, Meksiko, Turki) sebab memiliki karakteristik yang relatif sama dengan Indonesia dan untuk melihat perkembangan yang terjadi di negara-negara tersebut sejak bergabung dengan OECD. Di bawah ini merupakan analisis data terkait dinamika kondisi negara berkembang anggota OECD dengan menggunakan indikator OECD atau CLI.

1. Gross Domestic Products (GDP)

a. Chili

Adapun dengan menggunakan indikator OECD atau biasa disebut *Composite Leading Indicators* (CLI), dapat dijelaskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Chili yang telah bergabung ke dalam OECD sejak 2010 melalui data sebagai berikut:



Gambar 3.1 Grafik GDP Chili

Dipilihnya rentang waktu tersebut untuk mendapatkan bagaimana pertumbuhan GDP Chili empat tahun sebelum Chili bergabung dan empat tahun setelah bergabung ke OECD (OECD 2022). Dapat dijelaskan bahwa sejak bergabungnya Chili sebagai anggota OECD pada tahun 2010, terdapat peningkatan pada GDP Chili berdasarkan indikator

OECD atau CLI. Selanjutnya dapat dilihat pula bahwa angka GDP Chili sebelum bergabung dengan OECD bersifat fluktuatif dan selanjutnya secara konsisten mengalami peningkatan sejak 2010 hingga 2014, meskipun masih berada di bawah angka rata-rata negara anggota OECD di tahun yang sama.

Adapun isu-isu yang dihadapi Chili sebagai negara berkembang anggota OECD di antaranya:

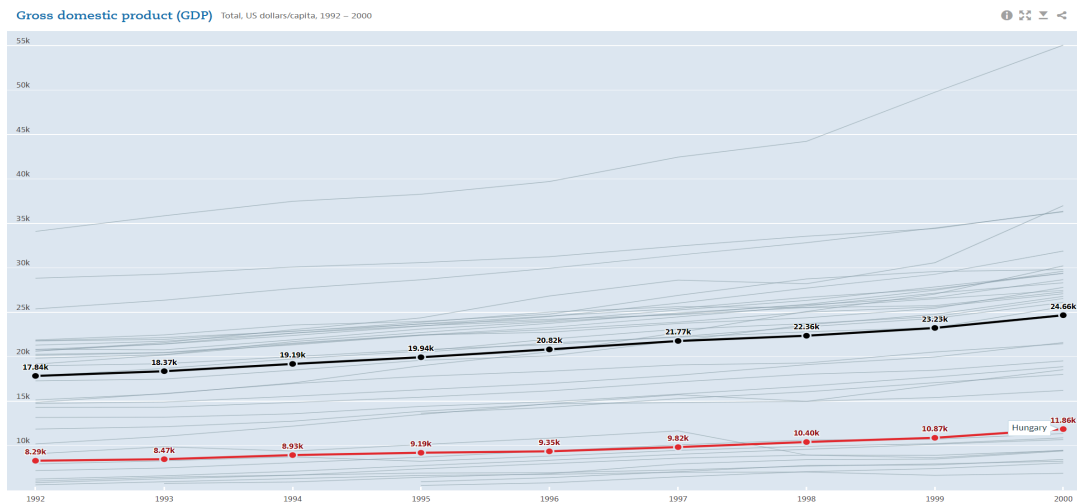
- i. **Perlindungan Lingkungan Hidup:** Chili menghadapi tantangan dalam menjaga lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, terutama karena adanya masalah seperti penggunaan air yang berlebihan, degradasi lahan, dan perubahan iklim. Sebagai anggota OECD, Chili diharapkan untuk mematuhi standar internasional dalam menjaga lingkungan dan menerapkan kebijakan yang berkelanjutan.
- ii. **Kesenjangan Sosial:** Chili mengalami masalah kesenjangan sosial yang signifikan, terutama dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Meskipun pemerintah telah melakukan reformasi sosial dalam beberapa tahun terakhir, masih ada banyak pekerjaan

yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ini. Sebagai anggota OECD, Chili diharapkan untuk mempromosikan inklusi sosial dan memperkuat jaminan sosial bagi warga negaranya.

- iii. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi: Chili telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dalam beberapa dekade terakhir. Namun, dengan menjadi anggota OECD, Chili diberikan akses ke pasar dan sumber daya baru, termasuk dukungan dalam bentuk teknologi, pelatihan, dan penelitian, untuk membantu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonominya (Nilsson 2006).

b. Hungaria

Adapun sejak sebelum bergabung dan setelah Hungaria bergabung sebagai negara anggota OECD pada tahun 1996 dapat dilihat pada grafik di bawah. Lebih lanjut, dipilihnya rentang waktu tersebut untuk mendapatkan bagaimana pertumbuhan GDP Hungaria empat tahun sebelum Hungaria bergabung dan empat tahun setelah bergabung ke OECD (OECD, n.d.).



Gambar 3.2 Grafik GDP Hungaria

Adapun angka GDP Hungaria bersifat fluktuatif bahkan setelah bergabung dengan OECD dan berada di bawah rata-rata OECD pada rentang tahun 1996-2000.

Sementara itu, isu-isu yang dihadapi Hungaria sebagai negara berkembang anggota OECD di antaranya:

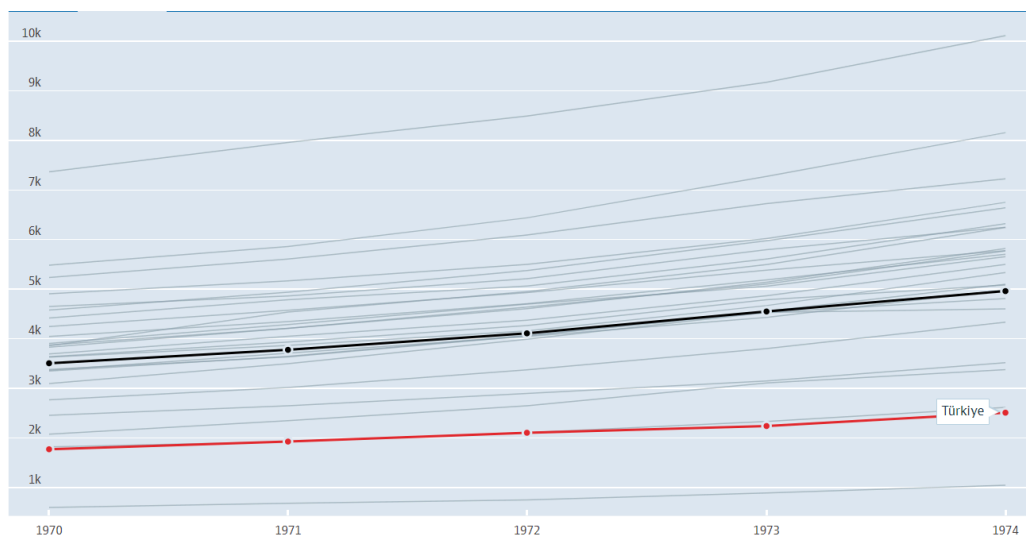
- i. Perlindungan Lingkungan Hidup: Chili menghadapi tantangan dalam menjaga lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, terutama karena adanya masalah seperti penggunaan air yang berlebihan, degradasi lahan, dan perubahan iklim. Sebagai anggota OECD, Chili diharapkan untuk mematuhi standar

internasional dalam menjaga lingkungan dan menerapkan kebijakan yang berkelanjutan.

- ii. Kesenjangan Sosial: Chili mengalami masalah kesenjangan sosial yang signifikan, terutama dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Meskipun pemerintah telah melakukan reformasi sosial dalam beberapa tahun terakhir, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ini. Sebagai anggota OECD, Chili diharapkan untuk mempromosikan inklusi sosial dan memperkuat jaminan sosial bagi warga negaranya.
- iii. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi: Chili telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dalam beberapa dekade terakhir. Namun, dengan menjadi anggota OECD, Chili diberikan akses ke pasar dan sumber daya baru, termasuk dukungan dalam bentuk teknologi, pelatihan, dan penelitian, untuk membantu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonominya (Nilsson 2006).

c. Turki

Adapun GDP Turki tahun 1970–1974 sejak bergabung sebagai negara anggota OECD pada tahun 196 dapat dilihat melalui grafik berikut. Pemilihan rentang waktu tersebut disebabkan oleh data tersedia pada website OECD terkait data awal GDP Turki sejak Turki bergabung dengan OECD dan empat tahun setelahnya (OECD 2022).



Gambar 3.3 Grafik GDP Turki

Adapun tren dari GDP Turki berdasarkan data di atas semenjak Turki bergabung dengan OECD mengalami peningkatan setiap tahunnya atau bersifat *up-trend* dan masih berada di bawah rata-rata total GDP OECD.

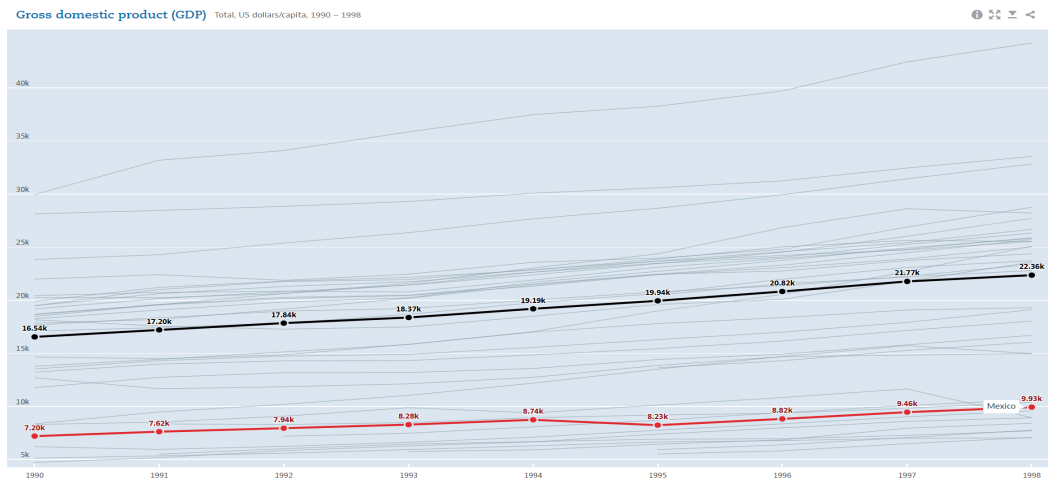
Sementara itu, isu-isu yang dihadapi Turki sebagai negara berkembang anggota OECD di antaranya:

- i. **Pertumbuhan Ekonomi:** Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu isu penting bagi Turki sebagai negara anggota OECD. Pada tahun 2021, Turki mengalami kontraksi ekonomi sebesar 1,8 persen akibat pandemi COVID-19 dan melemahnya nilai tukar lira Turki. Untuk mengatasi hal ini, Turki perlu mengembangkan ekonomi yang lebih beragam, meningkatkan efisiensi produksi, dan meningkatkan daya saing. Selain itu, Turki juga perlu memperkuat infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja baru untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
- ii. **Investasi Asing:** Investasi asing merupakan isu penting bagi Turki untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Namun, investasi asing di Turki terpengaruh oleh kondisi politik dan keamanan sehingga Turki perlu memperbaiki iklim investasi untuk menarik investasi asing.
- iii. **Pembangunan Infrastruktur:** Pembangunan infrastruktur merupakan isu penting yang harus dihadapi oleh Turki. Pembangunan

infrastruktur yang baik akan mempermudah aksesibilitas, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan daya saing Turki. Beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan di Turki adalah proyek pembangunan jalan tol, jembatan, dan kereta cepat. Namun, Turki masih menghadapi beberapa tantangan dalam pembangunan infrastruktur seperti kekurangan sumber daya dan biaya yang mahal (Nilsson 2006).

d. Meksiko

Adapun dengan menggunakan indikator OECD atau biasa *Composite Leading Indicators* (CLI), dapat dijelaskan pertumbuhan ekonomi dan pembangun Meksiko yang telah bergabung ke dalam OECD sejak tahun 1994 melalui data-data sebagai berikut:



Gambar 3.4 Grafik GDP Meksiko

Melalui data di atas dapat dilihat bahwa GDP Meksiko mengalami peningkatan dari sebelum bergabung dengan OECD dan bersifat fluktuatif namun masih berada di bawah rata-rata OECD tahun 1994–1998.

Sementara itu, isu-isu yang dihadapi Meksiko sebagai negara berkembang anggota OECD di antaranya:

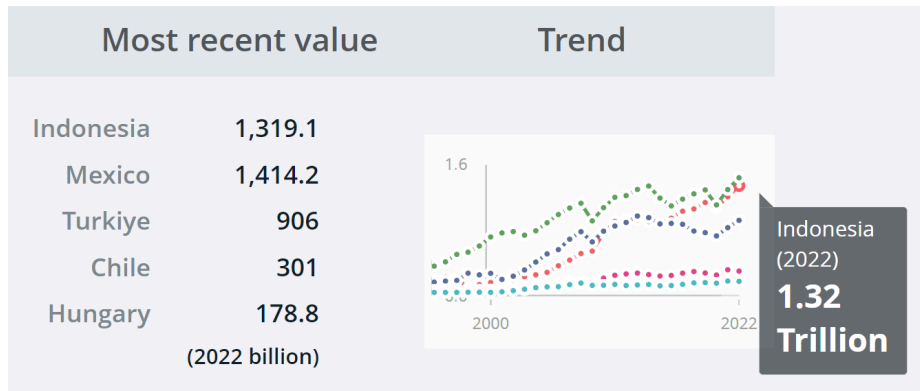
- i. Pertumbuhan ekonomi: Meksiko diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini menjadi penting karena Meksiko memiliki ketergantungan yang besar pada sektor manufaktur dan ekspor minyak bumi. Untuk mengatasi tantangan ini, Meksiko perlu

mengembangkan sektor ekonomi yang lebih beragam dan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.

- ii. Ketenagakerjaan: Meksiko memiliki tingkat ketenagakerjaan yang rendah dan banyak pekerjaan di sektor informal. Meksiko perlu mengembangkan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperbaiki kualitas pekerjaan.
- iii. Korupsi: Korupsi adalah masalah yang serius di Meksiko dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Oleh karena itu, Meksiko perlu terus memperkuat sistem peradilan dan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel (Nilsson 2006).

e. Indonesia

Adapun dalam menjelaskan dinamika kondisi Indonesia melalui indikator-indikator OECD atau *composite leading indicators* (CLI) sebagai *non-member economies* OECD adalah sebagai berikut:



Gambar 3.5 Perbandingan GDP Indonesia

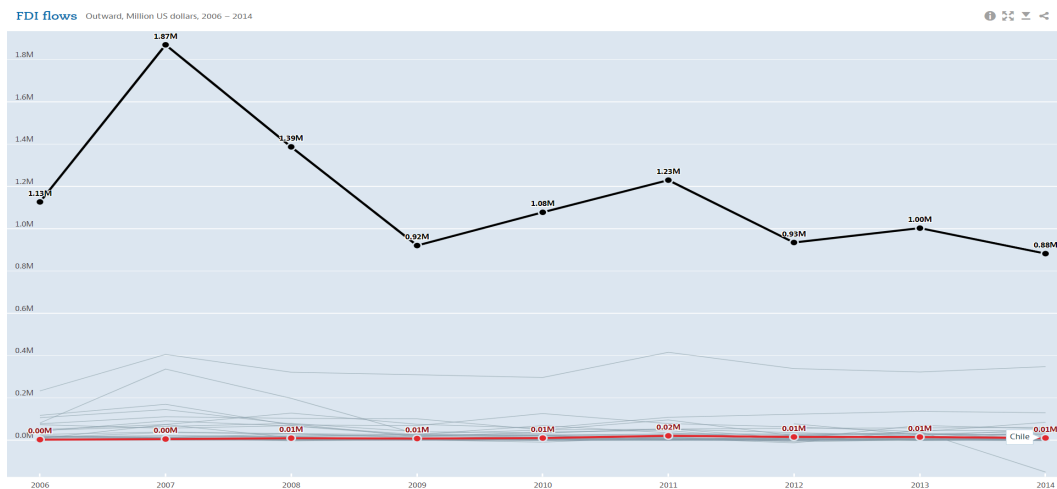
Pada rentang tahun 2000 hingga 2022, *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun berada di bawah Meksiko dalam hal GDP, Indonesia berhasil melampaui tiga negara berkembang OECD lainnya. Pertumbuhan GDP yang kuat menunjukkan perkembangan ekonomi yang positif dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia. Peningkatan ini dapat mencerminkan berbagai faktor, termasuk pertumbuhan sektor industri, pertanian, dan jasa, serta reformasi kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Kesuksesan Indonesia dalam meningkatkan GDP merupakan pencapaian yang penting dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (OECD 2021).

Melalui komparasi dari GDP sendiri dapat dilihat bahwa mayoritas negara berkembang anggota OECD semenjak berhasil meningkatkan kuantitas GDP negaranya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengimplemntasian *framework* OECD terhadap pertumbuhan GDP adalah berhasil, sehingga bila Indonesia mengaplikasikan *framework* OECD tersebut melalui menjadi anggota organisasi internasional tersebut, besar potensi Indonesia dalam mendongkrak GDP Indonesia di masa depan.

2. Foreign Direct Investment (FDI)

a. Chili

Adapun grafik data terkait *Foreign Direct Investment* (FDI) Chili 2006–2014 sejak sebelum dan setelah Chili bergabung dengan OECD pada tahun 2010 dapat dilihat pada grafik di bawah ini (OECD, n.d.)

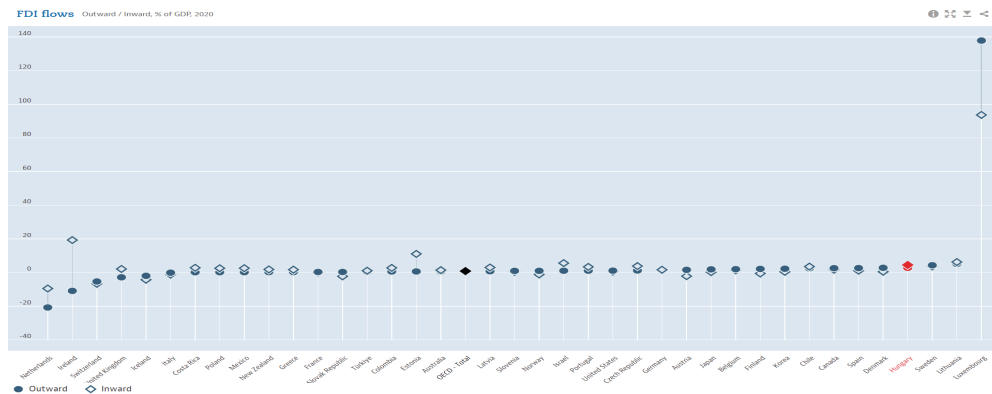


Gambar 3.6 Grafik FDI Chili

Berdasarkan data di atas sendiri, dapat dijelaskan bahwa sejak Chili bergabung menjadi negara anggota OECD pada tahun 2010, flow investasi Chili berhasil meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, flow investasi Chili setelah tahun 2010 tetap bersifat fluktuatif dan cenderung menurun tiap tahunnya serta keseluruhan masih berada di bawah rata-rata OECD.

b. Hungaria

Adapun FDI dari negara Hungaria semenjak bergabung dengan OECD melalui data tersedia pada rentang tahun 2005–2020 adalah sebagai berikut (OECD 2022).



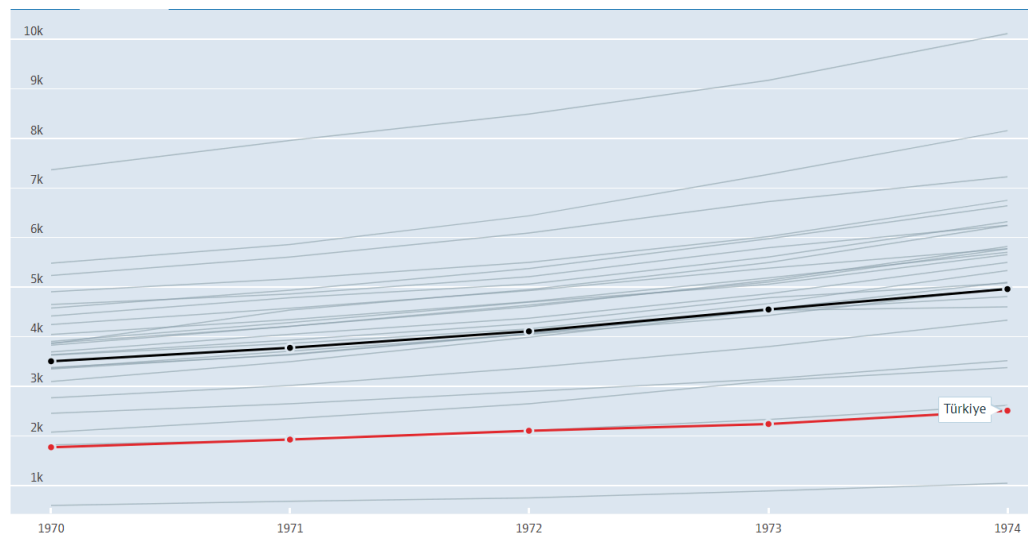
Gambar 3.7 FDI Hungaria

Adapun sejak bergabung dengan OECD pada tahun 1996, Sebagai anggota OECD, FDI Hungaria

bersifat fluktuatif namun tetap berhasil berada di atas rata-rata negara OECD.

c. Turki

Adapun terkait FDI Turki melalui data tersedia pada rentang tahun 2005–2021 sebagai negara anggota OECD dapat dilihat melalui grafik di bawah. Pemilihan rentang waktu tersebut pula karena data yang tersedia terkait FDI Turki dalam *website* OECD hanya pada tahun tersebut (OECD 2022).

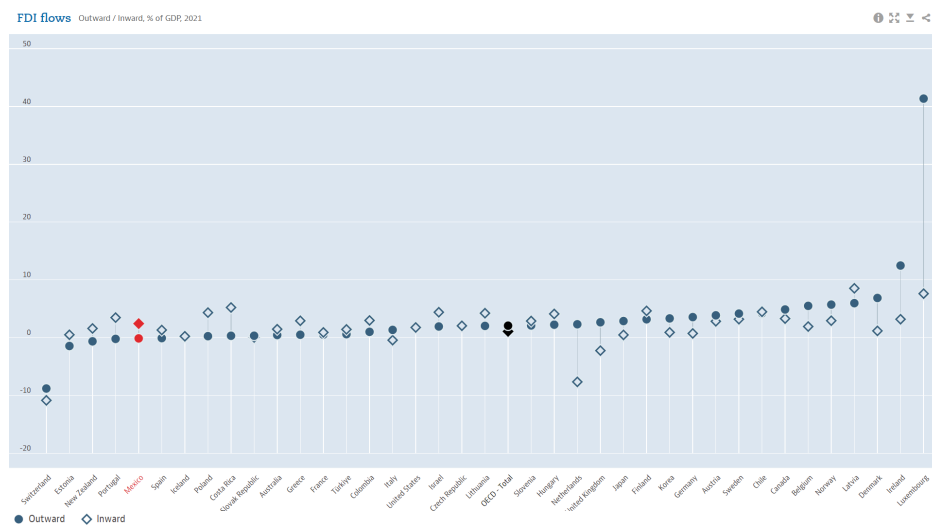


Gambar 3.8 Grafik FDI Turki

Adapun tren dari GDP Turki berdasarkan data di atas semenjak Turki bergabung dengan OECD mengalami peningkatan setiap tahunnya atau bersifat *up-trend* dan masih berada di bawah rata-rata total GDP OECD.

d. Meksiko

Adapun grafik data terkait *Foreign Direct Investment* (FDI) Meksiko dari data tersedia OECD pada tahun 2005–2020 sejak sebelum dan setelah Chili bergabung dengan OECD pada tahun 2010 dapat dilihat pada grafik di bawah ini (OECD, n.d.).



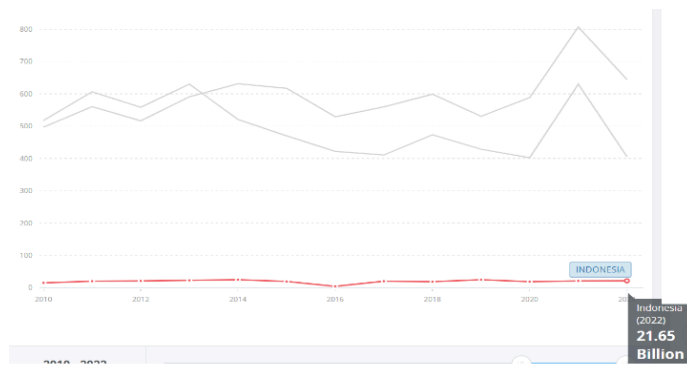
Gambar 3.9 FDI Meksiko

Sebelum bergabung dengan OECD, angka FDI Meksiko menunjukkan fluktuasi dan masih rendah dibanding negara-negara OECD lainnya. Setelah bergabung, kecenderungan ini tetap berlanjut. Meksiko harus berupaya meningkatkan stabilitas dan daya tarik investasinya untuk mencapai tingkat FDI yang lebih tinggi seperti negara-negara OECD (Nilsson 2006).

e. Indonesia

Berdasarkan indikator OECD atau CLI dijelaskan bahwa Investasi asing langsung merujuk pada aliran investasi dalam bentuk ekuitas secara langsung ke dalam perekonomian yang dicatatkan secara resmi. Ini mencakup jumlah modal ekuitas yang diinvestasikan, pendapatan yang diinvestasikan kembali, dan modal lainnya. Investasi langsung merupakan salah satu jenis investasi lintas batas yang melibatkan penduduk dari suatu negara yang memiliki kendali atau tingkat pengaruh yang signifikan terhadap manajemen perusahaan yang berada di negara lain. Dengan kata lain, ini adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari satu negara ke perusahaan di negara lain, yang memberikan mereka kontrol atau pengaruh penting atas perusahaan tersebut (The World Bank 2022).

Adapun data dilampirkan terkait tren dari FDI Indonesia pada rentang tahun 2010–2022. Dipilihnya rentang waktu tersebut untuk menunjukkan data terkini dari lebih satu dekade lalu.



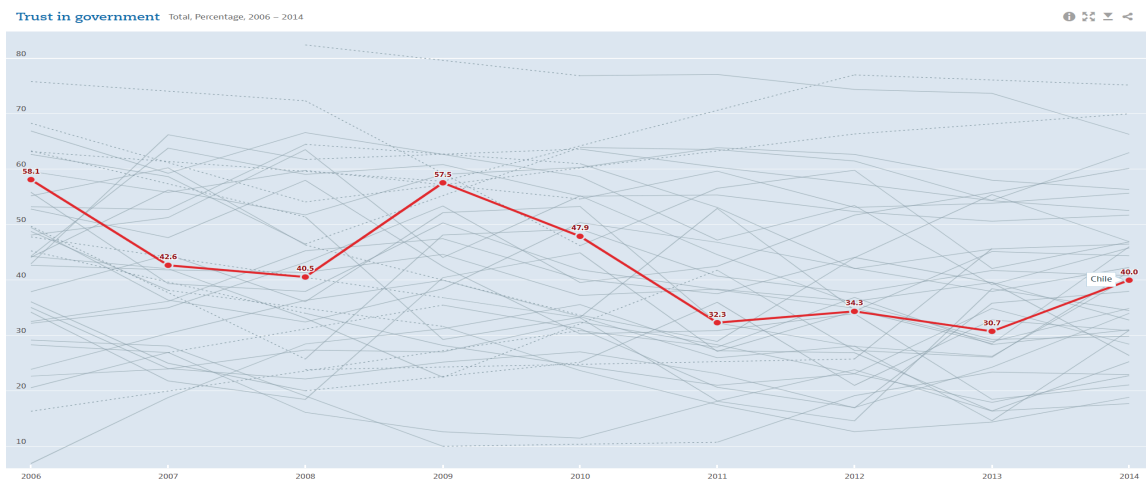
Gambar 3.10 Foreign Direct Investment Indonesia

Dapat disimpulkan melalui data di atas bahwa tren investasi asing Indonesia pada rentang waktu tersebut bersifat fluktuatif, namun cenderung mengalami kenaikan sejak beberapa tahun belakang dan menyentuh 21.65 Billion USD. Meskipun, jumlah tersebut masih jauh dari total FDI rata-rata negara yang memiliki upper middle income dengan total 406.13 Billion USD. Indonesia yang masih tertinggal jauh dalam aspek FDI perlu melakukan pembenahan terkait hal tersebut. Dengan melalui bantuan dari negara-negara maju OECD dan mengimplementasikan rekomendasi kebijakan yang matang, diharapkan nantinya kuantitas FDI Indonesia dapat meroket dengan melalui keikutsertaannya sebagai anggota tetap OECD dan bukan hanya sebagai NME (The World Bank 2022).

3. Government Trust dan Neraca Perdagangan

a. Chili

Adapun pada aspek pembangun Chili dilihat menggunakan CLI OECD *corruption perception index* melalui *government trust* Chili pada rentang tahun 2006-2014 dapat dilihat melalui grafik berikut ini. Pemilihan rentang waktu ini juga memiliki alasan yang sama dengan dua indikator CLI Chili sebelumnya (OECD 2022).

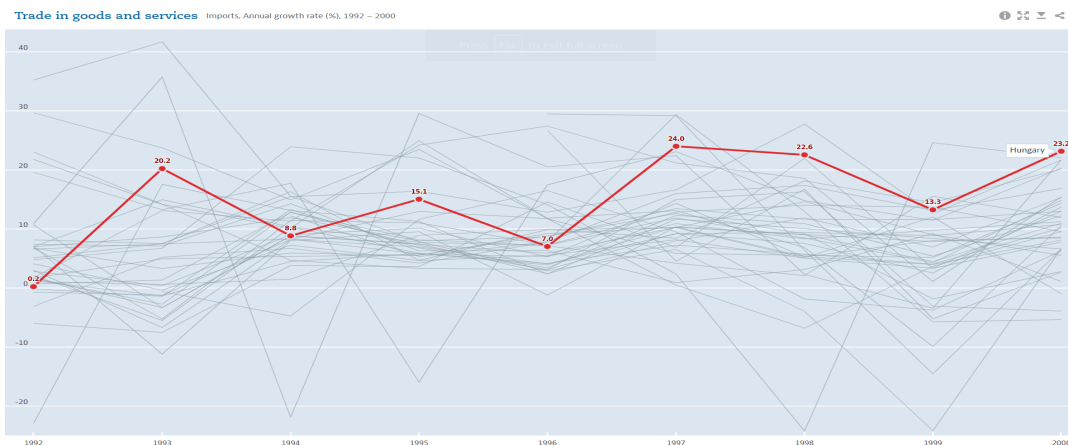


Gambar 3.11 Grafik Government Trust Chili

Adapun melalui data di atas dapat dijelaskan bahwa *government trust* dari negara Chili bersifat fluktuatif baik sebelum bergabung dengan OECD maupun setelahnya. Meskipun, melalui data tersedia dapat dilihat pula bahwa *government trust* Chili lebih cenderung mengalami *downtrend* pada rentang waktu 2010–2014.

b. Hungaria

Adapun neraca perdagangan Hungaria pada rentang tahun 1992–2000 sejak sebelum dan selepas Hungaria bergabung dengan OECD pada tahun 1996 dapat dilihat pada grafik di bawah. Pemilihan rentang waktu tersebut sendiri untuk mendapatkan bagaimana pertumbuhan GDP Hungaria empat tahun sebelum Hungaria bergabung dan empat tahun setelah bergabung ke OECD (OECD 2022).



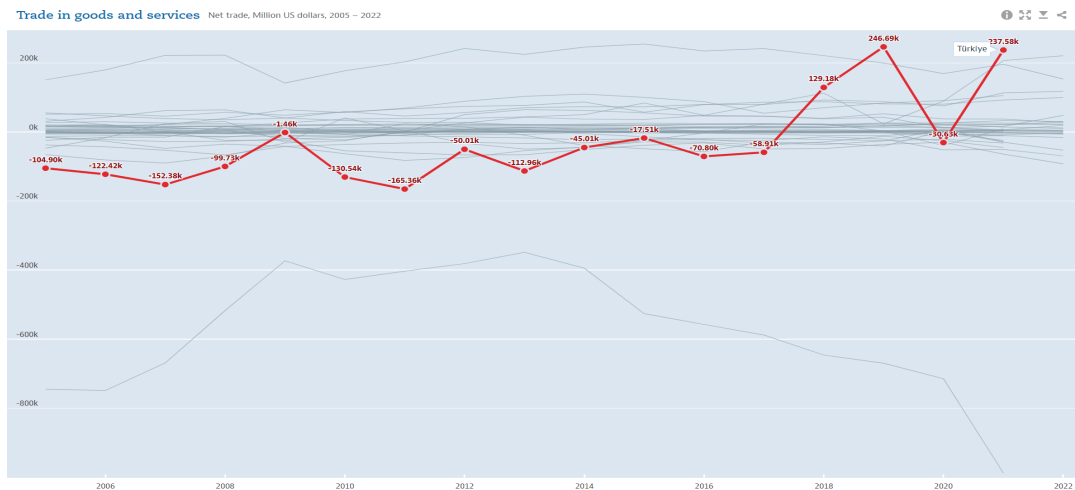
Gambar 3.12 Neraca Perdagangan Hungaria

Adapun neraca perdagangan negara Hungaria bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat sejak bergabung dengan OECD pada variabel impor, ekspor, dan *net trade*.

c. Turki

Adapun neraca perdagangan melalui *Trade in Goods and Services* Turki dalam rentang tahun 2005–2022 sebagai anggota OECD dapat dilihat

melalui data grafik di bawah. Pemilihan rentang waktu tersebut pula karena data yang tersedia terkait FDI Turki dalam *website* OECD hanya pada tahun tersebut (OECD 2022).



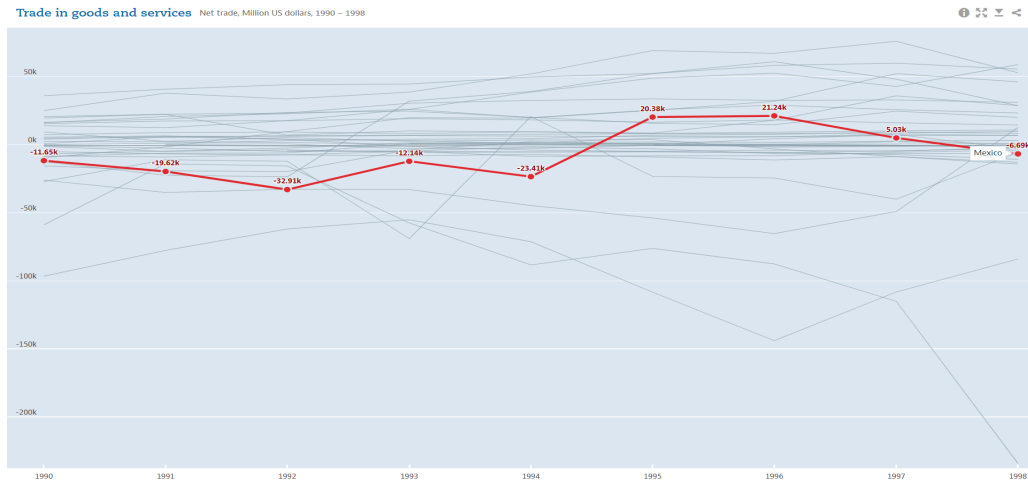
Gambar 3.13 Trade in Goods and Services Turki

Berdasarkan data di atas, adapun neraca perdagangan Turki pada *Trade in Goods and Services* dalam rentang tahun 2005–2022 bersifat fluktuatif. Namun, tetap mengalami kenaikan dan berhasil mencapai *all-time high* pada 2019 sebagai negara OECD (Nilsson 2006).

d. Meksiko

Adapun data grafik terkait neraca perdagangan melalui *Trade in Goods and Services* Meksiko pada rentang waktu 1990–1998 sejak bergabung dengan OECD adalah sebagai berikut. Dipilihnya rentang waktu tersebut untuk melihat

pertumbuhan GDP Meksiko empat tahun sebelum bergabung dan empat tahun setelah bergabung ke dalam OECD (OECD, n.d.).



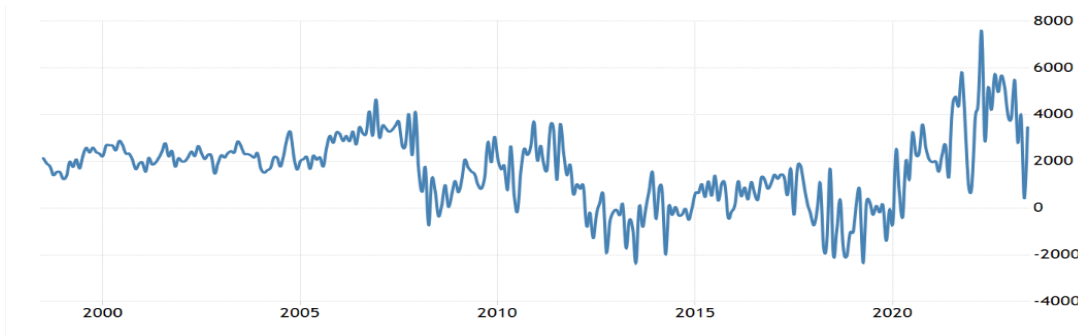
Gambar 3.14 Grafik Trade in Goods and Services Meksiko

Berdasarkan data-data di atas dapat dijelaskan bahwa neraca perdagangan Meksiko pada rentang tahun 1994–1998 berhasil meningkat meskipun bersifat fluktuatif sejak bergabung dengan OECD di tahun-tahun sebelumnya.

e. Indonesia

Adapun melalui salah satu indikator CLI yaitu neraca perdagangan. Lebih lanjut, melalui neraca perdagangan dapat memberikan gambaran tentang kesehatan ekonomi sebuah negara, dengan surplus perdagangan menunjukkan kelebihan ekspor dan defisit menunjukkan kelebihan impor. Neraca perdagangan juga dapat mempengaruhi nilai tukar

mata uang dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu, penting untuk melihat neraca perdagangan Indonesia dalam membuat sebuah pertimbangan alternatif keputusan. Adapun *chart data* di bawah merupakan neraca perdagangan Indonesia.



Gambar 3.15 Neraca Perdagangan Indonesia

Neraca perdagangan Indonesia pada rentang waktu 2000–2020 menunjukkan fluktuasi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan harga komoditas, kebijakan perdagangan, dan kondisi ekonomi global. Fluktuasi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas mata uang negara.

Dari data-data di atas terkait *government trust* Chili dan neraca Hungaria, Turki, dan Meksiko, dapat disimpulkan bahwa aspek *government trust* dan neraca perdagangan melalui *trade in goods and services* Indonesia sebagai NME OECD masih dapat bersaing dengan keempat negara tersebut. Oleh karena itu, jika

Indonesia nanti bergabung ke dalam OECD adalah lebih potensial untuk melihat *track record* negara-negara maju sebagai *potential sources* dalam meningkatkan *government trust* dan neraca perdagangannya.

3.2.2 Rumusan Kebijakan BSKLN

Dalam merumuskan rekomendasi kebijakan ini, BSKLN sendiri mempertimbangkan kepentingan terkhusus dalam meningkatkan ekonomi dan perdagangan negara. Selain kepentingan terkait, BSKLN juga mempertimbangkan potensi *cost and benefit* apabila Indonesia bergabung ke dalam OECD. Adapun hasil perumusan kebijakan sebagai bahan *advising* dari proses di atas di antaranya:

1. Meninjau Manfaat dan Tantangan Adopsi *Guidelines* OECD

Indonesia memiliki tingkat *engagement* yang beragam terhadap *guidelines* yang dikeluarkan oleh OECD. *Guidelines* ini bertujuan untuk mengarahkan kebijakan dan praktik ekonomi negara-negara anggota agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Meskipun Indonesia tidak mengadopsi seluruh *guidelines* yang dikeluarkan oleh OECD, negara ini telah mengambil langkah-langkah untuk mengadopsi beberapa *guidelines* yang dianggap relevan.

Salah satu contoh adopsi *guidelines* adalah *Model Tax Convention* yang disusun oleh OECD. Indonesia telah mengadopsi sebagian besar prinsip-prinsip dari *Model Tax Convention* ini, yang

bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak dan penghindaran kebijakan fiskal yang merugikan negara. Dengan mengadopsi *Model Tax Convention*, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam hal pertukaran informasi perpajakan dan memperkuat tata kelola perpajakan di dalam negeri.

Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam forum G20, yang merupakan forum ekonomi internasional yang terdiri dari negara-negara maju dan berkembang. Melalui forum ini, Indonesia telah berpartisipasi dalam pembahasan mengenai *OECD Corporate Governance Principles*. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi, dan melindungi kepentingan pemegang saham. Dengan berpartisipasi dalam forum G20, Indonesia memiliki kesempatan untuk mempelajari dan mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam konteks perusahaan di negara ini.

Namun demikian, terdapat juga *guidelines* yang perlu dicermati terlebih dahulu sebelum diadopsi oleh Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan konteks sosial, ekonomi, dan hukum antara Indonesia dengan negara-negara anggota OECD. *Guidelines* tersebut perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia untuk memastikan bahwa penerapannya memberikan manfaat yang optimal.

Dalam rangka mengadopsi *guidelines* OECD, Indonesia perlu melakukan tinjauan lebih mendalam terkait manfaat dan

tantangan yang mungkin timbul. Manfaatnya termasuk meningkatkan standar tata kelola perusahaan, mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan kerjasama internasional dalam berbagai bidang ekonomi. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup kesulitan dalam mengubah kebijakan dan praktik yang sudah ada, kebutuhan akan kapasitas kelembagaan yang memadai, dan penyesuaian dengan konteks lokal yang unik.

Dalam mengadopsi guidelines OECD, Indonesia perlu mempertimbangkan dengan seksama manfaat yang dapat diperoleh dan tantangan yang perlu dihadapi. Hal ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk memastikan implementasi yang efektif dan menghasilkan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat terus memperkuat keterlibatannya dalam mengadopsi *guidelines* OECD dan memainkan peran yang lebih aktif dalam pembentukan kebijakan ekonomi global.

2. Indonesia Memanfaatkan Program-Program OECD

Adapun Indonesia dapat memanfaatkan program-program dari OECD untuk berdialog dan meningkatkan kapasitas. Apabila Indonesia menjadi negara anggota OECD, Indonesia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan program *Enhanced Engagement* (EE) dan *OECD-Indonesia Joint Work Programme* (JWP) guna memperluas dialog dan meningkatkan kapasitas dalam kaitannya

dengan *guidelines* OECD. Melalui EE, Indonesia dapat meningkatkan partisipasinya dalam komite-komite OECD, serta mengintegrasikan diri dalam sistem pelaporan statistik yang digunakan oleh organisasi ini. Selain itu, EE juga memberikan dorongan untuk mematuhi instrumen-instrumen OECD yang relevan.

Sementara itu, JWP antara OECD dan Indonesia menawarkan berbagai kegiatan dialog, kerja sama teknis, penelitian, *workshop*, dan dukungan pengembangan kebijakan. Melalui JWP, Indonesia dapat memilih dan fokus pada instrumen-instrumen atau aktivitas yang sesuai dengan kepentingan nasional. Negara ini dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memenuhi persyaratan instrumen-instrumen tersebut atau berpartisipasi secara aktif untuk menyuarakan pandangan nasional dan pandangan negara-negara sejenis terhadap instrumen-instrumen tersebut.

Dengan memanfaatkan kedua mekanisme ini, Indonesia dapat mengambil manfaat yang signifikan. Pertama, negara ini dapat memperoleh akses ke pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh OECD, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan dan praktik ekonomi di dalam negeri. Kedua, Indonesia dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan internasional yang mempengaruhi bidang ekonomi, sehingga suara dan perspektif nasional dapat didengar dan dipertimbangkan secara lebih baik. Namun, penting untuk diingat bahwa pemanfaatan EE dan JWP juga

menghadapi tantangan. Indonesia perlu memastikan bahwa sumber daya yang memadai dialokasikan untuk memanfaatkan kesempatan ini secara efektif. Diperlukan komitmen dan koordinasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri untuk mengintegrasikan hasil dari dialog dan kerja sama ini ke dalam kebijakan dan praktik yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, melalui program *Enhanced Engagement* (EE) dan *OECD-Indonesia Joint Work Programme*, Indonesia dapat memperluas dialog dan meningkatkan kapasitasnya dalam mengadopsi guidelines OECD. Dengan memanfaatkan peluang ini, Indonesia dapat memperkuat partisipasinya dalam forum internasional, memperkaya pengetahuan dan keahlian nasional, serta memainkan peran yang lebih aktif dalam membentuk kebijakan ekonomi global yang berkelanjutan dan inklusif.

3. Kesempatan Indonesia dalam Dialog Bilateral

Indonesia memiliki kesempatan untuk melakukan dialog bilateral dengan negara-negara berkembang lain yang telah menjadi anggota OECD guna mempelajari tantangan, peluang, dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota OECD. Melalui pertukaran informasi dan pengalaman dengan negara-negara tersebut, Indonesia dapat memperoleh wawasan berharga tentang persiapan dan proses yang diperlukan untuk mengadopsi guidelines OECD.

Pendekatan khusus juga dapat dilakukan melalui kelompok Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia (MIKTA), yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Indonesia dapat memanfaatkan forum ini untuk berdiskusi dengan Meksiko dan Turki, yang juga merupakan anggota MIKTA, mengenai pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan OECD dan persiapan yang telah dilakukan untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota.

Meksiko dan Turki memiliki pengalaman yang relevan dalam menghadapi tantangan dan memenuhi persyaratan OECD. Meksiko telah menjadi anggota OECD sejak 1994, sementara Turki bergabung pada tahun 1961. Dalam dialog bilateral dengan kedua negara ini, Indonesia dapat mempelajari langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk memperkuat kerjasama dengan OECD, mengadopsi guidelines, dan meningkatkan tata kelola ekonomi.

Pertukaran pengalaman melalui dialog bilateral dengan negara-negara MIKTA juga dapat membantu Indonesia mengidentifikasi kesamaan perspektif dan kepentingan dengan negara-negara tersebut. Dalam menghadapi persyaratan dan tantangan yang ada, Indonesia dapat bekerja sama dengan Meksiko dan Turki untuk menyuarakan pandangan bersama dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk mengambil manfaat dari kekuatan kolektif negara-negara MIKTA dalam berinteraksi dengan OECD.

Negara-negara anggota MIKTA memiliki potensi untuk saling mendukung dalam persiapan dan penguatan kerjasama dengan OECD, serta berbagi pelajaran berharga dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul.

Dalam rangka meningkatkan dialog bilateral dengan negara-negara MIKTA yang telah menjadi anggota OECD, Indonesia perlu membangun kerangka kerja yang kuat untuk berbagi informasi, pengalaman, dan keahlian. Hal ini dapat melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan keterlibatan dan pemahaman yang komprehensif.

Dengan melakukan dialog bilateral dengan negara-negara berkembang yang telah menjadi anggota OECD, terutama melalui MIKTA, Indonesia dapat memperoleh wawasan berharga dan membangun kerjasama yang erat dalam upaya memenuhi persyaratan dan mengadopsi guidelines OECD. Dalam konteks ini, Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman dan pandangan negara-negara MIKTA untuk menghadapi tantangan dan memperkuat posisinya dalam menjalankan peran yang lebih aktif dalam kebijakan ekonomi global (Scott 2004).

3.2.3 *Potensi Keuntungan dan Risiko*

Dalam konsep *policy making* yang merumuskan kebijakan, BSKLN melakukan *advising* kebijakan terhadap rencana keikutsertaan Indonesia dalam *the Organisation and Economic*

Cooperation Development (OECD) berlandaskan komparasi dengan dinamika kondisi negara-negara berkembang anggota OECD (Chili, Hungaria, Meksiko, Turki). Oleh sebab itu, PSKM BSKLN sebagai bagian dari badan yang melakukan *advising*, perlu untuk melakukan analisis mendalam terkait konsekuensi yang ada dalam sebuah rumusan kebijakan yang hendak diimplementasikan.

Lebih jauh dalam merumuskan kebijakan tersebut perlu untuk menimbang potensi *cost and benefit* apabila Indonesia bergabung ke dalam OECD seperti di antaranya:

1. Kebijakan dalam Meninjau Manfaat dan Tantangan Adopsi *Guidelines* OECD

Konsekuensi dari tingkat *engagement* yang beragam terhadap *guidelines* OECD yang dilakukan oleh Indonesia dapat memiliki dampak yang beragam pula. Adapun beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi:

- a. Manfaat Penerapan *Guidelines*: Dengan mengadopsi beberapa guideline yang dianggap relevan, Indonesia dapat memperoleh manfaat positif dalam berbagai aspek. Misalnya, mengadopsi *Model Tax Convention* dapat membantu Indonesia dalam memperkuat tata kelola perpajakan dan meningkatkan kerjasama internasional dalam hal pertukaran informasi perpajakan. Mengadopsi OECD *Corporate Governance Principles* melalui forum G20 dapat

memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan transparansi.

- b. Penyesuaian pada Konteks Lokal: Indonesia juga perlu melakukan penyesuaian terhadap *guidelines* yang ingin diadopsi dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan hukum negara ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerapan *guidelines* tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia. Tinjauan yang lebih mendalam akan membantu mengidentifikasi manfaat spesifik dan tantangan yang terkait dengan adopsi *guidelines*.
- c. Tantangan dalam Implementasi: Implementasi *guidelines* dapat menghadapi tantangan tertentu. Misalnya, mengubah kebijakan dan praktik yang sudah ada mungkin memerlukan waktu, sumber daya, dan upaya yang signifikan. Peningkatan kapasitas kelembagaan juga bisa menjadi tantangan dalam mengadopsi *guidelines* yang lebih luas. Oleh karena itu, tinjauan lebih mendalam akan membantu dalam mengidentifikasi tantangan ini dan merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasinya.
- d. Peran dalam Kebijakan Ekonomi Global: Dengan berpartisipasi dalam adopsi *guidelines* OECD, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih aktif

dalam pembentukan kebijakan ekonomi global. Melalui *engagement* yang tepat, Indonesia dapat memperkuat suaranya dalam forum internasional dan mempengaruhi pembentukan aturan dan standar yang berlaku secara global.

2. Indonesia Memanfaatkan Program-Program OECD

Adapun *consequences* dari alternatif kebijakan Indonesia yang memanfaatkan program-program OECD seperti *Enhanced Engagement* dan *Joint Work Program* (JWP) sebagai berikut:

- a. Indonesia akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam komite-komite OECD. Partisipasi aktif dalam komite-komite ini akan memungkinkan Indonesia untuk mempengaruhi pembuatan keputusan dan arah kebijakan OECD. Indonesia dapat menyuarakan perspektif nasionalnya dan berkontribusi dalam mengembangkan *guidelines* yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia.
- b. Indonesia melalui EE dapat mengintegrasikan diri dalam sistem pelaporan statistik OECD. Hal ini penting karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data ekonomi Indonesia, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan kerjasama

internasional. Dengan mematuhi instrumen-instrumen OECD yang relevan, Indonesia juga dapat memperkuat tata kelola perusahaan, mencegah penghindaran pajak, dan mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam berbagai aspek ekonomi.

- c. Indonesia akan lebih terlibat dalam pengambilan keputusan internasional yang mempengaruhi bidang ekonomi. Dalam hal ini, Indonesia akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan harus memperhatikan komitmen dan kepentingan nasional pada konteks global.

3. Kesempatan Indonesia dalam Dialog Bilateral

Adapun *consequences* dari adanya kesempatan Indonesia dalam dialog bilateral di antaranya:

- a. Identifikasi Tantangan dan Peluang: Dialog bilateral dengan negara-negara anggota OECD akan membantu Indonesia mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam proses mengadopsi *guidelines* OECD. Negara-negara yang telah menjadi anggota memiliki pengalaman yang berharga dalam menghadapi kendala dan menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip OECD, yang dapat membantu Indonesia dalam

merencanakan langkah-langkah yang diperlukan. Sebagai satu contoh prospektif EE dan JWP yang probabilitas besar direalisasikan yaitu dapat dilihat melalui data terkhusus pada neraca perdagangan Turki di aspek *trade in goods and services* yang mengalami *up trend* yang cukup signifikan pada rentang waktu 2005-2022 dan terus mengalami pertumbuhan setelah Turki bergabung dengan OECD. Oleh karena itu, adalah dirasa penting bagaimana Indonesia bisa mengikuti jejak rekam Turki dalam meningkatkan pendapatan domestik dan luar negeri serta nilai tukar riil Indonesia melalui dialog bilateral antara Turki dan Indonesia dengan menggunakan *framework* yang telah ditetapkan oleh OECD.

- b. Peningkatan Profil dan Pengaruh: Melalui dialog bilateral yang aktif dengan negara-negara anggota OECD, Indonesia dapat meningkatkan profilnya sebagai aktor yang berperan aktif dalam masalah ekonomi global. Hal ini akan membantu Indonesia memperkuat pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan ekonomi global dan memberikan suara kepada negara-negara sejenis dalam forum internasional.

3.3 Alur Pembuatan Keputusan Luar Negeri

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kementerian Luar Negeri memiliki koordinasi yang sangat penting dan terstruktur dalam konteks berupaya dan menyatakan penegasan kembali akan prinsip geografisnya dalam administrasi internalnya. Dalam proses perumusan kebijakan terkait rencana keikutsertaan Indonesia dalam OECD, Kemlu memiliki departemen di bawahnya yang berfokus dalam riset dan analisis yaitu Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) (Berridge 2010, 16).

Dalam perumusan kebijakan tersebut, seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, BSKLN perlu melewati beberapa tahapan alur analisis dalam melakukan *advising* keikutsertaan Indonesia ke dalam OECD, seperti di antaranya:

1. *Analysis of Purposes*: Dalam merumuskan kebijakan luar negeri, perlu untuk memiliki tujuan dan program dan misi terhadap organisasi di dalamnya.
2. *Analysis of Cause and Effect*: Perlu untuk melakukan elaborasi lebih jauh dalam memberikan penjelasan setelah menganalisis tujuan. Hal tersebut dimulai dengan mengelaborasi *cause and effect* yang terdiri atas *explanation, evaluation, prediction, dan prescription*.
3. *Analysis of Structure and Process*: Adapun akhir dari tahapan analisis perumusan kebijakan ketiga ini adalah *functional analysis* yang mana melihat cakupan hubungan antara aktor-aktor maupun tiap-tiap bagian (Lovell 1970, 16).

Setelah menyelesaikan tahapan di atas, BSKLN telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyusun kebijakan teknis, rencana, dan program analisis serta rekomendasi strategi kebijakan terkait penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri. Dengan berhasilnya tahapan tersebut, BSKLN mampu memenuhi perannya secara efektif dalam menyusun arah kebijakan yang relevan dan komprehensif dalam konteks hubungan internasional. Analisis yang cermat dan rekomendasi yang terperinci telah dihasilkan untuk mendukung keputusan strategis dalam menjalankan fungsi negara di tingkat internasional.

Selanjutnya, telah dilaksanakannya tupoksi BSKLN dalam perumusan rekomendasi kebijakan terhadap keikutsertaan Indonesia dalam OECD melalui pendefinisian dan komparasi negara berkembang anggota OECD dengan Indonesia, data-data relevan dari BSKLN akan diproses untuk menyelesaikan *ongoing problem* yang dihadapi dan kemudian diidentifikasi lebih lanjut oleh *appropriate channels* dari berbagai bidang dalam struktur pembuat keputusan (Lovell 1970, 208).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang kerja sama ekonomi dan pembangunan, OECD memiliki tujuan untuk untuk mempererat kerja serta memperbaiki proses penyusunan kebijakan ekonomi negara anggota dan negara lain di dunia demi mewujudkan stabilitas perekonomian yang berkelanjutan. Adapun Indonesia yang masih berstatus negara mitra kunci atau NME OECD, namun telah memiliki kesiapan dan sesuai dengan standar negara-negara OECD. Indonesia sendiri tengah mempersiapkan keputusan akhir terkait keikutsertaannya dalam OECD yang telah disusun oleh PSKM BSKLN.

Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan luar negeri oleh BSKLN perlu dijelaskan dengan konsep *policy making* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh BSKLN yang nantinya dapat digunakan sebagai tahapan-tahapan dalam menentukan kepentingan Indonesia jika bergabung ke dalam OECD. Salah satunya adalah dengan mengkomparasi negara-negara berkembang anggota OECD dengan Indonesia melalui dinamika kondisi negara seperti pada aspek GDP, neraca perdagangan, FDI, dan *corruption index* dalam mendapatkan apakah negara-negara anggota OECD tersebut mengalami pertumbuhan sejak bergabung ke dalam OECD.

4.2 Rekomendasi

4.2.1 Rekomendasi kepada BSKLN

Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan terhadap proses pembuatan kebijakan selanjutnya juga akan memperhatikan hal-hal seperti:

1. Studi Dampak Sosial dan Lingkungan: Keputusan final dari kebijakan keikutsertaan Indonesia ke OECD juga dapat mengidentifikasi dan mengatasi dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan yang akan diterapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, namun juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
2. Kebijakan Inovatif: Proses pembuatan kebijakan dapat menggunakan pendekatan dan strategi inovatif lagi untuk mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil penelitian semacam ini dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang efektif. Adapun dengan berkolaborasi dengan potensi muda dapat memberikan perspektif baru terkait hal ini.

4.2.2 Rekomendasi Kegiatan Praktik Kerja

Adapun rekomendasi penulis terhadap kegiatan praktik kerja adalah sebagai berikut:

1. Proyek bersama mahasiswa UII dengan instansi terkait.

Mahasiswa UII memiliki rancangan proyek yang secara eksklusif bekerja sama langsung dengan instansi terkait dalam berkolaborasi untuk meningkatkan kerja sama sehingga terdapat hasil karya yang riil sebagai dokumentasi yang dapat menjadi sebuah simbol bagi kedua pihak terkait.

2. Perjanjian komitmen magang

Untuk meminimalisir adanya peserta magang yang tidak berkomitmen dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan yang mana dapat merugikan tim ataupun instansi terkait, perlu dibuatkannya semacam kontrak perjanjian kerja yang mengikat peserta magang sehingga terdapat kejelasan sanksi bagi peserta magang yang tidak menaati kontrak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Berridge, G.R. 2010. *Diplomacy: Theory and Practice*. London: Palgrave Macmillan.
- Braconier, Henrik, and Jenifer R. Valenzuela. 2014. "Explaining recent developments in earning differentials." In *Gross Earning Inequalities in OECD Countries and Major Non-Member Economies*. Paris: OECD Publishing.
- Elisabeth, Adriana, Dhurorudin Mashad, Ganewati Wuryandari, Ganewati Wuryandari, M. R. Muna, and Nanto Sriyanto. 2011. *Politik luar negeri Indonesia di tengah arus perubahan politik internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lovell, John P. 1970. *Foreign policy in Perspective*. Bloomington: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Nilsson, Ronny. 2006. "Composite Leading Indicators For Individual Countries." In *Composite Leading Indicators and Growth Cycles in Major OECD Non-Member Economies and recently new OECD Members Countries*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/118143571177>.
- OECD. 2017. *Report of the Chair of the Working Group on the Future Size and Membership of the Organisation to Council: Framework for the Consideration of Prospective Members*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. 2021. *OECD Economic Surveys: Indonesia 2021*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. 2022. *OECD-Indonesia Joint Work Programme 2022-2025*.
- Scott, Richard. 2004. "Cooperation with Non-Member Countries: The Global Perspective", in *The History of the International Energy Agency*. Vol. 1. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264020931-en>
- Sekaran, Uma, and Roger Bougie. 2010. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. West Sussex: Wiley.

Jurnal

- Bappi, Usman. 2015. *Decision Making Theory*.
- Kafle, Tulasi R. 2011. "Making a Difference: Allison's Three Models of Foreign Policy Analysis." *Academia*.

Website

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019. "Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia." Kemlu. https://kemlu.go.id/portal/id/struktur_organisasi/96/kepala-badan-strategi-kebijakan-luar-negeri.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2023. "Fungsi Kementerian Luar Negeri | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia." Kemlu. https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/14/halaman_list_lainnya/fungsi-kementerian-luar-negeri.
- Kemlu RI. 2019. "Kepala Pusat Strategi Kebijakan Luar Negeri Multilateral |

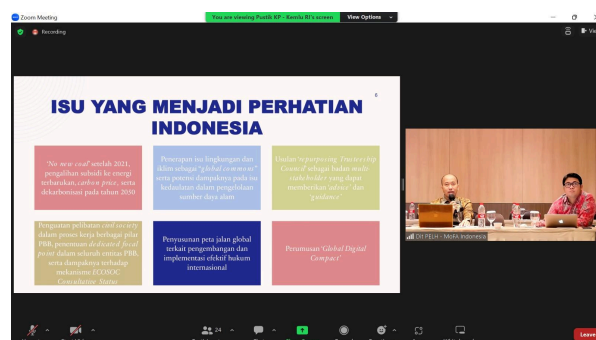
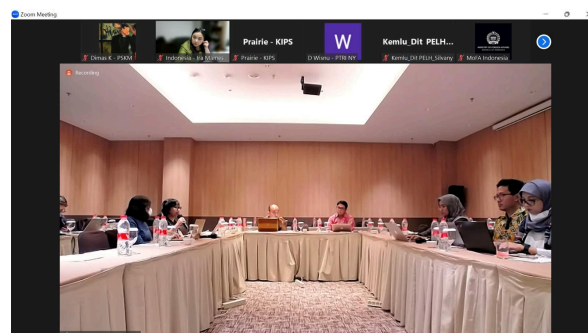
- Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.” Kemlu.
https://kemlu.go.id/portal/id/struktur_organisasi/107/kepala-pusat-strategi-k-ebijakan-luar-negeri-multilateral.
- Kemlu RI. n.d. “Struktur Organisasi | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.” Kemlu. Accessed July 14, 2023.
https://kemlu.go.id/portal/id/list/struktur_organisasi/struktur-organisasi.
- OECD. 2022. “Corruption Perception Index Chile.” OECD Data.
<https://data.oecd.org/chart/72kY>.
- OECD. 2022. “FDI Hungary.” OECD Data. <https://data.oecd.org/chart/72l6>.
- OECD. 2022. “FDI Turkiye.” OECD Data. <https://data.oecd.org/chart/72lA>.
- OECD. 2022. “GDP Chile.” OECD Data. <https://data.oecd.org/chart/72kB>.
- OECD. 2022. “GDP Turkiye.” OECD Data. <https://data.oecd.org/chart/72lw>.
- OECD. 2022. “Trade Balance Hungary.” OECD Data.
<https://data.oecd.org/chart/72l3>.
- OECD. 2022. “Trade Balance Turkiye.” OECD Data.
<https://data.oecd.org/chart/72lD>.
- OECD. 2023. “Income inequality (indicator).” OECD Data.
<https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm#indicator-chart>.
- OECD. n.d. “Discover the OECD.” OECD. Accessed July 12, 2023.
<https://www.oecd.org/general/Key-information-about-the-OECD.pdf>.
- OECD. n.d. “FDI Chile.” OECD Data. Accessed July 21, 2023.
<https://data.oecd.org/chart/72kO>.
- OECD. n.d. “FDI Mexico.” OECD Data. Accessed July 21, 2023.
<https://data.oecd.org/chart/72lp>.
- OECD. n.d. “GDP Hungary.” OECD Data. Accessed July 21, 2023.
<https://data.oecd.org/chart/72l1>.
- OECD. n.d. “GDP Mexico.” OECD Data. Accessed July 21, 2023.
<https://data.oecd.org/chart/72l8>.
- OECD. n.d. “The OECD's Relations with its Key Partners.” OECD. Accessed July 12, 2023.
<https://www.oecd.org/general/theoecdsrelationswithitskeypartners.htm>.
- OECD. n.d. “Trade Balance Mexico.” OECD Data. Accessed July 21, 2023.
<https://data.oecd.org/chart/72lc..>
- The World Bank. 2022. “Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US\$) - Indonesia.” The World Bank Data.
<https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?contextual=aggregate&end=2022&locations=ID&start=2008&view=chart>.
- World Bank. n.d. “Poverty headcount ratio at \$2.15 a day (2017 PPP) (% of population) - Indonesia, Lower middle income.” The World Bank Data.
<https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?contextual=min&end=2022&locations=ID-XN&start=1981&view=chart>.

LAMPIRAN

1. *Tour de Kemlu RI* yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2023 untuk memperkenalkan peserta praktik kerja lingkungan Kemlu RI.



2. *Focus Group Discussion*: Tindak Lanjut *Our Common Agenda* yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2023 oleh Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup (PELH) Kemlu RI dan PSKM BSKLN Kemlu RI sebagai narasumber.



3. Proses pembuatan konten media sosial PSKM BSKLN dan *Power Point* untuk presentasi diplomat PSKM pada forum Keketuaan MIKTA Indonesia 2023: Rekomendasi Aksi Konkret.

